

**ANALISIS KEBIJAKAN PENGURANGAN RISIKO
BENCANA DIWILAYAH RAWAN BANJIR
(Studi Di Desa Banjarasri Kecamatan Tanggulangin
Kabupaten Sidoarjo)**

SKRIPSI

**Untuk Melengkapi Tugas dan memenuhi salah satu syaratguna
mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik (S.AP)**



Disusun Oleh :

Karina Herdiana Sari

2018020013

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS DR. SOETOMO
SURABAYA
2022**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**ANALISIS KEBIJAKAN PENGURANGAN RISIKO
BENCANA DIWILAYAH RAWAN BANJIR
(Studi Di Desa Banjarasri Kecamatan Tanggulangin
Kabupaten Sidoarjo)**

Oleh :

Karina Herdiana Sari

2018020013

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS DR. SOETOMO
SURABAYA
2022**

Menyetujui

Pembimbing,

Dr. Hendro Wardhono, M.Si

NIP. 196809101993031001

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS KEBIJAKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA DIWILAYAH RAWAN BANJIR (Studi Di Desa Banjarasri Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo)

Disusun Oleh :

Karian Herdiana Sari

2018020013

Telah dipertahankan di depan Sidang Dewan Penguji

Pada Tanggal 18 Februari 2022 dan dinyatakan

Telah memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji

Penguji I : Dr. Hendro Wardhono, M.Si

Penguji II : Drs. Basuki Nugroho, M.Si

Penguji III : Widyawati, S.Sos, M.Si

Surabaya, 18 Februari 2022

Universitas Dr. Soetomo

Fakultas Ilmu Administrasi

Dekan,

Prof. Dr. Sedarmayanti, M.Pd

NIDN. 0712115201

PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebanar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah SKRIPSI ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah SKRIPSI ini dapat dibuktikan terdapat unsure-unsur PLAGIASI, saya bersedia SKRIPSI ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai undang-undang yang berlaku.

Surabaya, 17 Februari 2022

Mahasiswa,

Karina Herdiana Sari

NIM: 2018020013

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Dr. Soetomo

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis sampai kepada Allah, karna dengan rahmat, hidayah dan inayahNya, penulisan dapat menyelesaikan tahapan penyusunan tugas Skripsi yang berjudul Analisis Kebijakan Pengurangan Resiko Banjir Di Wilayah Rawan Banjir (Studi di Desa Banjarasri Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo). Penyelesaian karya ilmiah ini kami patut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Siti Marwiyah, S.H, M.H, selaku Rektor Dr. Soetomo Surabaya, yang telah memberikan kesempatan dan persetujuan kepada kami untuk mengikuti program studi Administrasi Publik;
2. Prof. Dr. Sedarmayanti, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo Surabaya yang telah memberikan kesempatan dan berbagai fasilitas dalam mengikuti program studi Administrasi Publik;
3. Sri Roekminiati, S.Sos, M.KP, selaku Ketua program studi Administrasi Publik, yang telah memberikan bimbingan teknis dan akademik mengikuti perkuliahan dalam program studi Administrasi Publik;
4. Dr. Hendro Wardhono, M.Si, sebagai bimbingan yang dengan sabar membimbing kami, sehingga kami dapat menyelesaikan karya ilmiah ini;
5. Seluruh dosen pengampuh di program studi Administrasi Publik, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sehingga dapat menambah kasanah keilmuan penulisan, khususnya dalam penyusunan karya ilmiah ini;

6. Orang tua yang sudah mendoakan dan memberikan dana secara ikhlas, teman-teman tersayang (kang Nazilatul, Nova komti, Dewi yeppeoyo) saya yang sudah membantu saya menyusun karya ilmiah ini.

Akhirnya semoga, amal baik semua pihak yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini mendapat balasan dari Allah sebagai amal yang baik. Terima kasih.

Surabaya , 17 Februari 2022

Karina Herdiana Sari

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tahapan penyusunan Skripsi yang berjudul Analisis Kebijakan Pengurangan Resiko Bencana Banjir di Wilayah Rawan Banjir (Studi di Desa Banjarasri Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo). Maksud dari karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi dari kebijakan pengurangan resiko bencana banjir di kawasan Desa Banjarasri dimana merupakan kawasan yang rawan banjir dan untuk menganalisis agar dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan pada Desa tersebut. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah: (i) Untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan serta program pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Sidoarjo secara umum dan di Desa Banjarasri secara khusus; dan (ii) untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung serta menghambat pelaksanaan kebijakan atau program pengurangan risiko bencana banjir pada Desa Banjarasri, Kabupaten Sidoarjo.

Sehubungan dengan tujuan tersebut, maka dasar acuan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Pasal 37 ayat 2 tentang Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana. Kemudian metode yang digunakan untuk meneliti adalah metode kualitatif yang mana ditentukan fokus penelitiannya adalah: (i) implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana banjir berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 37 Ayat 2 ; (ii) Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat jalannya kebijakan pengurangan risiko

bencana banjir di Desa Banjarasri, Kabupaten Sidoarjo; dan (iii) penyusunan rekomendasi kebijakan berlandaskan hasil dari kegiatan analisis kebijakan Pengurangan Resiko Bencana yang telah dilakukan berpijak pada teori-teori mengenai konsep pengurangan resikobencana yang relevan

Terakhir, penulis sadar dan mengerti bahwa dalam proses penyusunan karya ilmiah Skripsi ini, masih memiliki beberapa kekurangan, sehingga saran serta kritik yang konstruktik dan membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk dapat membantu penulis berkembang menjadi lebih baik lagi. Terima Kasih

Surabaya, 17 Februari 2022

Karina Herdiana Sari

NIM : 2018200013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Kebijakan Publik	12
2.3 Analisis Kebijakan Publik.....	14
2.4 Manajemen Bencana	16

2.5	Pengurangan Risiko Bencana.....	21
BAB III METODE PENELITIAN		25
3.1.	Jenis Penelitian.....	25
3.2	Fokus Penelitian	25
3.3	Informan Penelitian	26
3.4	Lokasi Penelitian	27
3.5	Jenis dan Sumber Data	28
3.6	Teknik Pengumpulan Data	28
3.7	Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		32
4.1	Deskripsi Lokasi Penelitian.....	32
4.1.1	Desa Banjarasri	32
4.1.2	BPBD Kabupaten Sidoarjo.....	34
4.2	Hasil Temuan Penelitian	38
4.2.1	Kondisi Bencana Banjir di Desa Banjarasri	39
4.2.2	Implementasi Kebijakan Pengurangan Resiko Bencana Sesuai UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 37 Ayat 2	43
4.2.3	Perencanaan Partisipatif Penanggulangan Bencana	50
4.2.4	Pengembangan Budaya Sadar Bencana	51
4.2.5	Peningkatan Komitmen Terhadap Pelaku Penanggulangan Bencana.....	53
4.2.6	Penerapan Upaya Fisik, Nonfisik, dan Pengaturan Penanggulangan Bencana	55
4.2.7	Faktor-Faktor Implementasi Kebijakan Pengurangan Resiko Bencana	

.....	60
4.3 Rekomendasi Kebijakan.....	64
BAB V PENUTUP.....	69
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 4.2 Luas Wilayah Menurut Penggunaan.....	33
Tabel 4.3 Monitoring Bencana Banjir Desa Bajarasri.....	42
Tabel 4.4 Data Keluarga Petani.....	67
Tabel 4.5 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tren Bencana Indonesia Tahun 2020.....	3
Gambar 1.2 Bencana di Jawa Timur Januari-Juli 2021.....	6
Gambar 3.3 Komponen Analisis Data.....	31
Gambar 4.4 Struktur Organisasi.....	34
Gambar 4.5 Pemetaan Kejadian Bencana Bulan Desember 2021.....	40
Gambar 4.6 Ringkasan Kejadian Banjir Genangan Tahun 2021.....	41
Gambar 4.7 Peta Prakiraan Daerah Potensi Banjir Jawa Timur 2022.....	46
Gambar 4.8 Peta Potensi Risiko Bencana Banjir.....	48
Gambar 4.9 Titik Toilet Portable.....	58
Gambar 4.10 Titik Tandon Air.....	59
Gambar 4.11 Gambaran Mitigasi Bencana Fisik.....	74
Gambar 4.12 Foto Wawancara dan Observasi.....	75

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan potensi bencana yang cukup tinggi. Bencana yang terus meningkat tentu juga memberi kerugian cukup besar pada masyarakat dan pemerintah, sehingga penanganan untuk mengurangi resiko bencana merupakan hal yang perlu dilakukan. Desa Banjarasri merupakan salah satu desa yang termasuk dalam kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Sidoarjo. Bencana banjir masih terus melanda Desa Banjarasri sejak tahun 2019 sampai sekarang meskipun kebijakan pengurangan resiko bencana banjir sudah diterapkan untuk menanggulangnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengurangan resiko banjir pada penanganan bencana banjir di Desa Banjarasri.

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengurangan resiko bencana banjir di Desa Banjarasri sudah terlaksana dengan cukup baik atas koordinasi dan kooperasi dari masyarakat dan BPBD. Faktor pendukung dari terlaksananya kebijakan ini ada pada kinerja BPBD Kabupaten Sidoarjo yang memperoleh IKD yang baik, sinergi masyarakat dan pemerintah, serta adanya komunitas-komunitas. Sementara hal yang menghambat adalah adanya *refocusing* dana ketika *covid-19* sehingga terdapat rencana mitigasi non-struktural yang terhambat dari pihak BPBD, selain itu adanya oknum-oknum warga yang melakukan pemabngunan ilegal di tanah-tanah resapan. Meski implementasi kebijakan dinyatakan baik, peneliti menemukan bahwa permasalahan warga Desa Banjarasri dalam pengurangan resiko bencana tidak hanya berhenti pada mitigasi fisik. Namun juga perlu mitigasi non-fisik yang tidak terbatas pada kesiapan menghadapi bencana dari sisi prasarana, namun juga siap menghadapi bencana dari sisi perekonomian. Sehingga peneliti memberikan rekomendasi kebijakan untuk memprioritaskan pemulihan ekonomi jangka panjang.

Kata kunci : Analisis Kebijakan, Pengurangan Resiko Bencana, dan Banjir.

ABSTRACT

Increase of course also provide considerable losses to the community and the government, so handling to reduce disaster risk is something that needs to be done. Banjarasri Village is one of the villages that is included in a flood-prone area in Sidoarjo Regency. Flood disasters have continued to hit Banjarasri Village Indonesia is an archipelagic country with a high potential for disasters. Disasters that continue to since 2019 until now even though flood disaster risk reduction policies have been implemented to overcome them. This study aims to analyze the policy of reducing flood risk in handling flood disasters in Banjarasri Village.

The results of this study indicate that the implementation of flood risk reduction policies in Banjarasri Village has been carried out quite well with coordination and cooperation from the community and BPBD. The supporting factors for the implementation of this policy are the performance of the Sidoarjo Regency BPBD which obtains a good IKD, community and government synergy, and the existence of communities. Meanwhile, the thing that hinders it is the refocusing of funds during Covid-19 so that there are non-structural mitigation plans that are hampered by the BPBD, besides that there are elements of citizens who carry out illegal construction in infiltration lands. Although the implementation of the policy was declared good, the researchers found that the problems of the residents of Banjarasri Village in reducing disaster risk did not only stop at physical mitigation. However, non-physical mitigation is also necessary which is not limited to disaster preparedness in terms of infrastructure, but is also prepared to face disasters from an economic perspective. So that researchers provide policy recommendations to prioritize long-term economic recovery.

Keywords: Policy Analysis, Reduction of Disaster Risk, and Flood.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara republik yang berbentuk negara kesatuan atau biasanya disebut dengan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), sebutan ini ada didasari oleh kondisi geografis, demografis, sejarah, geologis, serta sosial yang sangat beragam sehingga menjadikan Indonesia menjadi wilayah letaknya sangat strategis dengan kekayaan alam yang melimpah serta keberagaman flora dan fauna yang luar biasa Indah. Potensi-potensi ini dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk mengembangkan diri serta mengembangkan sumber daya yang ada sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan aktivitas pertambangan yang cukup aktif, juga menjadi negara pariwisata yang disenangi destinasi wisatanya. Meski keberagaman tersebut menjadi sisi positif untuk negara Indonesia, disisi juga memiliki sisi negatif dikarenakan juga menjadilakan Indonesia sebagai wilayah yang cukup rentan dihadapang oleh bencana alam. Indonesia merupakan negara yang berada di zona berisiko tinggi yang mana sejajar dengan Lingkaran Api Pasifik (*Ring of Fire*). Lingkaran Api Pasifik merupakan daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudra pasifik. Sering kali gempabumi, tsunami dan letusan gunung berapi terjadi di Indonesia dalam rentang waktu yang berdekatan. Selain itu mengingat dua musim di Indonesia yaitu musim hujan dan musim kemarau juga membawa pengaruh besar terhadap bencana yang sering terjadi.

Bencana yang terus meningkat tentu juga memberi kerugian yang cukup besar pada keberlangsungan hidup masyarakat dikarenakan mata pencaharian yang menghilang, kemiskinan yang akan semakin meningkat karena kehilangan aset-aset berharga, serta kesulitan untuk mencari nafkah kembali dengan kondisi yang ada. Resiko dari bencana ini juga semakin menjadi perhatian dunia karena dampak dari adanya suatu bencana juga akan berdampak pada kondisi negara-negara lain yang berkaitan dengan kerugian tersebut. Karena risiko bencana ini tidak hanya berhenti pada datangnya kemiskinan, namun juga meningkatnya kerentanan terkait dengan perubahan kondisi demografis, teknologi, dan sosial-ekonomi, urbanisasi yang tidak direncanakan, pembangunan dalam zona berisiko tinggi, lingkungan degradasi, variabilitas iklim, perubahan iklim, bahaya geologis, dan kelangkaan sumber daya, menunjukkan masa depan di mana bencana dapat semakin mengancam ekonomi dunia, populasinya dan pembangunan berkelanjutan dari negara-negara berkembang. Ramli dalam (Rakasisi, 2018) mengemukakan bahwa bencana yaitu rangkaian peristiwa atau peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam serta faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis.

Berikut adalah tren kejadian bencana yang sering terjadi dalam rentang tahun 2020 di Indonesia.



Gambar 1.1 Bencana Indonesia tahun 2020

Sumber: bnpb.go.id

Bencana yang seringkali terjadi dilihat dari tabel tersebut adalah banjir, yang merupakan salah satu bencana alam yang dapat menimbulkan kerugian besar dan mengancam beberapa wilayah di Indonesia. Bencana banjir dapat dipengaruhi oleh faktor alam seperti curah hujan yang tidak bisa diprediksi serta adanya pasang naik air laut, hingga banjir yang terjadi karena ulah manusia seperti membangun permukiman di daerah resapan, di daerah bantaran sungai, penggundulan hutan dan membuang sampah di sembarang tempat. Mayoritas masyarakat tidak menyadari bahwa bencana yang terjadi selama ini merupakan akibat dari ulah masyarakat itu sendiri dengan cara merusak lingkungan. Masyarakat harus turut serta dalam membantu pelaksanaan penanggulangan bencana tersebut agar dapat terhindar dari berbagai macam bencana yang dapat menyebabkan terhambatnya laju pembangunan.

Maka dari itu, pemahaman pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas respon bencana menjadi suatu hal yang semakin penting,

manajemendan pengurangan risiko bencana alam di Indonesia khususnya terus menjadi tantangan global. Dalam menanggapi masalah yang krusial terkait bencana yang sering terjadi di Indonesia, pemerintah memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana baik kondisi pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat dan komprehensif untuk penanggulangan bencana.

UU Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007 memberikan dasar bagi penanggulangan bencana dan PRB di Indonesia. Bersama dengan rangkaian peraturan yang dikeluarkan tahun 2008, UU ini menjabarkan seperangkat ketentuan komprehensif yang merangkum tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, hak dan kewajiban masyarakat, peran lembaga usaha dan internasional, tahap-tahap penanggulangan bencana yang berbeda, serta bantuan keuangan dan penanggulangan bencana. Pengembangan ini terhubung dengan komitmen utama dalam penerapan PRB yang telah disusun oleh pemerintah Indonesia dengan diadopsinya HyogoFramework for Action/HFA (Kerangka Kerja Hyogo untuk Aksi). Indonesia telah membuat langkah yang tegas dan positif demi memadukan dan melaksanakan rekomendasi utama HFA.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pra bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi: 1) Kesiapsiagaan, 2) Peringatan dini, dan 3) Mitigasi bencana. Oleh sebab itu, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana diharap dapat semakin membaik, karena pemerintahan dan pemerintahdaerah jadi penanggung jawab pada usaha penanggulangan

bencana. Secara rinci disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kotamadya.

Tidak hanya pemerintah, akan tetapi masyarakat tanah air juga memiliki hak terhadap keamanan dan perlindungan sesuai dengan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 disebutkan suatu pemerintah negara Indonesiayang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang artinya pemerintah dibentuk selain untuk menjalankan tata kelola negara tetapi juga berperan dalam menjamin perlindungan dan keamanan masyarakat. Untuk menjalankan peran pemerintah dalam melindungi masyarakatnya dan menanggulangi bencana yang ada, pemerintah Indonesia membentuk suatu lembaga bernama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Adapun lembaga untuk mengurus tingkat daerah bernama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di berbagai daerah. BPBD mempunyai peran dan tanggungjawab yang sama dengan BNPB hanya saja lembaga ini dibentuk untuk mengurus urusan penanggulangan bencana tingkat daerah. Mengingat Indonesia merupakan negara desentralisasi yang luas dengan beberapa provinsi yang tersebar sehingga BPBD dibentuk untuk mengurus daerahnya masing- masing.



Gambar 1.2 Bencana di Jawa Timur Januari-Juli 2021

Sumber: suarasurabaya.net (2021)

Pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa bencana yang paling sering terjadi di Jawa Timur adalah bencana banjir yang mana mencapai 143 kasus bencana banjir yang terjadi sepanjang bulan Januari hingga Juli pada tahun 2021 di Jawa Timur. Hal ini dikarenakan negara Indonesia beriklim tropis, dan Jawa Timur pun merupakan daerah yang rawan banjir serta tanah longsor karena cuaca yang ekstrem. Sementara itu pada laporan Bulan November 2020, Kabupaten Sidoarjo mengalami kejadian banjir genangan sebanyak 11 kejadian dimana 2 kejadian banjir genangan berada di Desa Banjarasri dan Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin sampai berlangsung lebih dari 3 hari. Sementara di wilayah lainnya seperti Desa Banjarpanji dan Kalitengah Kecamatan Tanggulangin, Desa Pesawahan Kecamatan Porong surut setelah 3 hari. Desa Candi Pari Kecamatan Porong surut dalam 2 hari. Desa Kesambi, Pamotan, Gedang Kecamatan Porong, Desa Kedung Pandan Kecamatan Jabon, Desa Penambangan Kecamatan Balongbendo surut dalam 1 hari (Sidoarjo, 2020).

Pada tahun 2020 lalu, Desa Banjarsari, Kabupaten Sidoarjo dilanda banjir yang tak kunjung surut dan belum teratasi secara permanen hingga saat ini punrelokasi masih terus dilakukan oleh Pemerintah. Pemerintah menetapkan status tanggap darurat bencana pada bulan Februari tahun 2020, dan penetapan tanggap darurat itu dilansir karena kondisi banjir yang tak kunjung surut sampai hampir dua bulan. Dengan ditetapkannya status tanggap darurat ini berarti semua tindakan yang akan diambil untuk mengatasi banjir itu harus jelas dan terukur, terutama dalam penanganan dampak banjir ini. pada tindakan tersebut, Pemerintah memanfaatkan Biaya Tidak Terduga (BTT) yang sudah dialokasikan dalam APBD Sidoarjo tahun 2020 sebesar 10 miliar. dalam aksinya nanti, semua pompa akan dikerahkan, terdapat 8 pompa yang akan digunakan untuk menyedot air. Kemudian normalisasi sungai juga akan dimaksimalkan dengan mngerahkan ponton (Taufiq, 2020).

Dalam mengurangi, mencegah maupun menanggulangi bencana- bencana yang ada tersebut, pemerintah pusat mengamanatkan kepada seluruh isntansi pemerintahan daerah untuk menjadikan upaya pengurangan risiko bencana menjadi bagian dari setiap perencanaan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, dikatakan bahwa upaya pengurangan risiko bencana ditingkat daerah harus menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD). Yang mana artinya adalah implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana tidak dapat dilakukan melalui satu undang- undang atau peraturan yang diterbitkan melalui instansi tunggal semata. Sehingga perlu adanya sinkronisasi antar lembaga pembuat epraturan dan pelaksana teknis yang

cukup baik pada masing-masing *stakeholder*. Namun sayangnya, permasalahan sinkronisasi peraturan di Indonesia masih menjadi tantangan di beberapa pemerintah daerah di Indonesia, khususnya daerah-daerah pinggiran (Wandasari, 2013). Oleh karena itu, analisis mengenai kebijakan pengurangan risiko bencana pada pembangunan maupun pada penanggulangan bencana pada daerah-daerah pinggiran ini perludilakukan untuk mempersempit jarak ketertinggalan upaya pengurangan resikobencana. Salah satunya pada Desa Banjarasri, Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi serta kesadaran pikiran dari masyarakat sertapemerintahan Kabupaten Sidoarjo dalam pengurangan resiko banjir di Desa Banjarasri, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kebijakan pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh Pemerintah setempat pada Desa Banjarasri melalui sudut pandang manajemen bencana dan komponen atau aspek-aspek dari pengurangan risiko bencana. Analisis kebijakan merupakan hal yang perlu dilakukan karen auntuk melihat apakah memang kebijakan yang sudah berjalan benar-benar sudah secara efektif dan efisien membantu kesejahteraan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk membatasi penelitian, maka dirumuskan masalah yaitu :

- 1) Bagaimana implementasi kebijakan serta program pengurangan risiko bencana di wilayah rawan banjir Kabupaten Sidoarjo, terutama di Desabanjarasri?
- 2) Faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dana tau penghambat pelaksanaan kebijakan dana tau program pengurangan resiko bencana pada Desa Banjarasri, Kabupaten Sidoarjo?
- 3) Berdasarkan implementasi kebijakan tersebut serta faktor yang telah diketahui, bagaimana rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pengurangan risiko bencana banjir di Desa Banjarasri berdasarkan teori serta referensi yang relevan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam pelaksanaan peneoitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan serta program pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Sidoarjo secara umum dan di Desa Banjarasri secara khusus.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung serta menghambat pelaksanaan kebijakan atau program pengurangan resiko bencana banjir pada Desa banjarasri, Kabupaten Sidoarjo.
- 3) Untuk mengetahui rekomendasi kebijakan yang tepat mengenai pengurangan risiko bencana banjir di Desa Banjarasri, Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1) Secara teoritis, penelitian ini dapat mengembangkan teori dan konsep dalam disiplin ilmu kebijakan publik, khususnya dalam penanggulangan bencana.
- 2) Secara praktis, kegunaan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta bahan pertimbangan upaya peningkatan efektivitas tindakan pengurangan resiko bencana banjir dalam penanggulangan bencana

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil	Perbedaan	Persamaan
1	(Widayat, 2020)	Studi Kajian Peran BPBD dan Aisiyah <i>Disaster Action</i> dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana di Surakarta	Peran BPBD Kota Surakarta dalam penanggulangan banjir adalah dengan membangun parapet dan embung di sekitar Bengawan Solo dan di bendungan Tirtonadi untuk menampung debitair yang tinggi. Sementara Aisiyyah <i>Disaster Action</i> berperan sebagai peng- <i>cross check</i> lapangan secara langsung dan membuat pelaporan mengenai keadaan sebenarnya di wilayah bencana.	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah ada pada fokus penelitian yang berfokus pada pengkajian peran BPBD dan Aisiyah sementara pada penelitian penulis berfokus pada kebijakannya.	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sedang dikaji penulis ada pada penggunaan acuan konsep pengurangan resiko bencana.
2	(Agustino, 2020)	Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia	Penanganan wabah covid-19 dinilai lamban karena lambatnya pengambilan keputusan karena nihilnya perasaan krisis di awal wabah ada, lemahnya koordinasi antar <i>stakeholder</i> , dan kurangnya kepatuhan dari warga atas himbauan pemerintah.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulsi ada pada objek penelitian yang dibahas adalah Penanganan wabah <i>covid-19</i> , sementara penulis fokus pada bencana banjir.	Persamaan penelitian inid engan penelitian penulis ada pada sama-sama berfokus pada analisis kebijakan penanganan bencana.

3	(Riay Ibu Khaldun, 2019)	Analisis Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus PERDA Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011)	Penanggulangan kurang optimal karena proses akomodasi untuk meminimalisir risiko bencana kurang maksimal, kesesuaian program dengan penanggulangan masih minim, dan program kurang terimplementasikan dengan baik.	Perbedaan pada penelitian ini ada pada fokus dari penelitian ini ada pada penanggulangan bencana, sementara peneliti mengusung fokus pengurangan resiko bencana.	Persamaan antara kedua penelitian ini ada pada fokus pada analisis kebijakan bencana.
4	(Akrib, 2021)	Analisis kebijakan Resettlement dalam Penanggulangan Bencana Alam di Lampung Selatan	Dalam keputusan kebijakan <i>resettlement</i> , pada pelaksanaannya berdampak pada beberapa aspek kehidupan masyarakat yang dipindahkan seperti dalam aspek ekonomi dan sosial	Perbedaan pada penelitian ini ada pada fokus penelitian yang berfokus pada <i>resettlement</i> penanggulanagan bencana, sementara peneliti mengusung fokus pengurangan resiko bencana	Persamaan antara kedua penelitian ini ada pada fokus pada analisis kebijakan bencana
5	(Muhammad, 2019)	Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir di Kabuptaten Bandung Studi Kebijakan Mitigasi bencana Banjir di Desa Dayeuhkolot Kabupaten Bandung	Implementasi belum berjalan dengan maksimal karena masih terdapat permasalahan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hal ini ditandai dengan pencegahan rencana banjir, penanganan darurat bencana banjir, rehabilitasi, dan rekonstruyksi bencana banjir, dsb.	Perbedaan antara kedua penelitian adalah ada pada fokus yang berfokus pada mitigasi bencana, sementara peneliti fokus pada pengurangan resiko bencana.	Persamaan dari kedua penelitian sama-sama menganalisis implementasi kebijakan pada penanganan banjir.

Sumber : Dokumentasi Peneliti

2.2 Kebijakan Publik

Konsep kebijakan adalah tindakan yang mengarah pada suatu tindakan yang bermaksud untuk mengatasi suatu masalah yang dilakukan oleh sejumlah aktor kebijakan (Anderson dalam (Winarno, 2007)). Sementara itu, kebijakan

publik adalah segala hal yang ditentukan oleh pemerintah dalam artian pemerintah dapat memilih apa yang dikerjakan dan apa yang tidak perlu untuk dikerjakan melalui suatu kebijakan yang dikeluarkan (Nugroho, 2009). Dalam hal ini, kebijakan merupakan suatu rangkaian yang diusulkan oleh suatu kelompok atau individu dalam pemerintah yang mana usulan tadi diharapkan dapat menjadi jembatan untuk mencapai tujuan dari suatu negara.

Banyak terminologi kebijakan publik yang dapat dilihat dari sudut pandang mana kita memaknainya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat (Teguh, 2002). Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah (Iskandar, 2000). Pengertian kebijakan publik lainnya juga diungkapkan oleh Anderson yang menyatakan kebijakan publik sebagai *a purposive course of action followed by an actor on set an actors in dealing with a problem or matter of concern* atau sebagai tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah (Teguh, 2002).

Michael E. Porter menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif dari setiap negara ditentukan oleh seberapa mampu negara tersebut mampu menciptakan lingkungan yang menumbuhkan daya saing dari setiap aktor di dalamnya (Thoha, 1999). Dalam konteks persaingan global, maka tugas sektor publik adalah membangun lingkungan yang memungkinkan setiap pelaku pembangunan mampu

mengembangkan diri menjadi pelaku-pelaku yang kompetitif. Lingkungan ini hanya dapat diciptakan secara efektif oleh adanya kebijakan publik. Karena itu, kebijakan publik terbaik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing dan bukan semakin menjerumuskan ke dalam pola ketergantungan.

Dari uraian di atas kebijakan publik dapat diartikan sebagai manajemen pencapaian tujuan nasional. Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik yaitu:

- 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuannasional;
- 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

2.3 Analisis Kebijakan Publik

William N. Dunn menjelaskan Analisis kebijakan publik adalah suatu disiplin ilmu sosial, terapan, yang menggunakan berbagai macam metodologi penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan dengan kebijakan, yang digunakan dalam lingkungan politik tertentu, untuk memecahkan masalahmasalah kebijakan (RI, 2008). Jadi analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai

penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan. Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik.

Analisis kebijakan publik berdasarkan kajian kebijakannya dapat dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik tertentu dan sesudah adanya kebijakan publik tertentu. Analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik berpijak pada permasalahan publik semata sehingga hasilnya benar-benar sebuah rekomendasi kebijakan publik yang baru. Keduanya baik analisis kebijakan sebelum maupun sesudah adanya kebijakan mempunyai tujuan yang sama yakni memberikan rekomendasi kebijakan kepada penentu kebijakan agar didapat kebijakan yang lebih berkualitas. Dunn membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan publik, yaitu: (Dunn, 2000)

- 1) Analisis kebijakan prospektif. yaitu berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisis kebijakan disini merupakan suatu alat untuk mensintesis informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan.
- 2) Analisis kebijakan retrospektif, adalah sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Terdapat 3 tipe analisis berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analisis ini yakni analisis yang berorientasi pada disiplin, analisis yang berorientasi pada masalah dan analisis yang berorientasi pada aplikasi.

3) Analisis kebijakan yang terintegrasi, merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para analis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat.

Dalam arti luas, analisis kebijakan publik adalah suatu bentuk penelitian terapan untuk memahami secara mendalam berbagai permasalahan sosial guna mendapatkan pemecahan yang lebih baik.

2.4 Manajemen Bencana

Menurut Departemen Kesehatan RI (2001), definisi bencana adalah peristiwa atau kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia, serta memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermakna sehingga memerlukan bantuan luar biasa dari pihak luar. Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. (UU 24/2007).

Manajemen bencana menurut (Nurjanah, 2012) sebagai Proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen bencana seperti *planning, organizing,*

actuating, dan controlling. Cara kerjanya meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan. Manajemen bencana menurut (University British Columbia) ialah proses pembentukan atau penetapan tujuan bersama dan nilai bersama (*common value*) untuk mendorong pihak-pihak yang terlibat (*partisipan*) untuk menyusun rencana dan menghadapi baik bencana potensial maupun aktual.

Adapun tujuan manajemen bencana secara umum adalah sebagai berikut:

1) Mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup; 2) Menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban; 3) Mengembalikan korban bencana dari daerah penampungan/ pengungsian ke daerah asal bila memungkinkan atau merelokasi ke daerah baru yang layak huni dan aman; 4) Mengembalikan fungsifasilitas umum utama, seperti komunikasi/ transportasi, air minum, listrik, dan telepon, termasuk mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana; 5) Mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut; 6) Meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan. Secara umum manajemen bencana dapat dikelompokkan menjadi 3 tahapan dengan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan mulai dari pra bencana, pada saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Yang mana akan dipaparkan sebagai berikut: (Nurjanah, 2012)

1) Tahap Pra Bencana (mencakup Kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini).

a) Pencegahan (*prevention*)

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana (jika mungkin dengan meniadakan bahaya). Misalnya : Melarang pembakaran hutan dalam perladangan, Melarang penambangan batu di daerah yang curam, dan Melarang membuang sampah sembarangan.

b) Mitigasi Bencana (*mitigation*)

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi dapat dilakukan melalui pelaksanaan penataan ruang; b) pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan c) penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern (UU Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 47 ayat 2 tentang Penanggulangan Bencana).

c) Kesiapsiagaan (*preparedness*)

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Beberapa bentuk aktivitas kesiapsiagaan yang dapat dilakukan antara lain: a) penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; b) pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini; c) penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; d) pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat; e) penyiapan lokasi evakuasi; f) penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tentang tanggap darurat bencana; dan g) penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemulihan prasarana dan sarana.

d) Peringatan Dini (*Early Warning*)

Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang (UU 24/2007) atau Upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi. Pemberian peringatan dini harus : Menjangkau masyarakat (*accessible*), Segera (*immediate*), Tegas tidak membingungkan (*coherent*), Bersifat resmi (*official*).

2) Tahap saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan bantuan darurat dan pengungsian.

a) Tanggap Darurat (*response*)

Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Beberapa aktivitas yang dilakukan pada tahapan tanggap darurat antara lain: a) pengkajian yang dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya; b) penentuan status keadaan darurat bencana; c) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; d) pemenuhan kebutuhan dasar; e) perlindungan terhadap kelompok rentan; dan f) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital (UU Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 48 tentang Penanggulangan Bencana).

b) Bantuan darurat (*relief*)

Merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa : Pangan, Sandang, Tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi dan air bersih

3) Tahap pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

a) Pemulihan (*recovery*)

Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Beberapa kegiatan yang terkait dengan pemulihan adalah a) perbaikan lingkungan daerah bencana; b) perbaikan prasarana dan sarana umum; c) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; d) pemulihan sosial psikologis; e) pelayanan kesehatan; f) rekonsiliasi dan resolusi konflik; g) pemulihan sosial ekonomi budaya, dan j) pemulihan fungsi pelayanan publik.

b) Rehabilitasi (*rehabilitation*)

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan : perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan,

rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik.

c) Rekonstruksi (*reconstruction*)

Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usahaserta langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana. Lingkup pelaksanaan rekonstruksi terdiri atas program rekonstruksi fisik dan program rekonstruksi non fisik.

2.5 Pengurangan Risiko Bencana

Bencana bukan merupakan istilah yang asing bagi masyarakat Indonesia. Namun, bencana sebagai sistem pengetahuan (epistemologi) tidak mudah dipahami secara menyeluruh (komprehensif). Dalam kamus pengetahuan, istilah bencana begitu semarak dan mengemuka saat beberapa peristiwa bencana melanda wilayah Indonesia. Bencana gempa yang terjadi di Yogyakarta dan sekitarnya, menjadi momentum bagi masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran pengetahuannya tentang hal awal seputar bencana. Di samping istilah bencana begitu lekat di benak pikiran masyarakat, terlebih masyarakat yang secara

langsung mengalami musibah itu, pengetahuan tentang bencana ini diliput secara luas oleh media massa, baik cetak maupun elektronik. Dengan demikian, secara epistemologis, bencana kiranya dapat dimaknai secara luas sebagai suatu kajian mendalam tentang peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan berakibat terhadap kerusakan material maupun immaterial baik ditinjau dari aspek sosial, budaya, politik, dan seterusnya.

Untuk mengetahui kapan bencana alam akan terjadi merupakan pekerjaan yang sulit. Hal ini dikarenakan bencana alam dapat terjadi secara tiba-tiba di mana pun dan kapan pun. Oleh karena itu, penting dilakukan pemantauan resiko bencana dan sistem peringatan dini (*early warning system*) yang berfungsi sebagai “*alarm*” darurat sewaktu-waktu bencana alam datang secara tidak terduga. Untuk itu, penting dilakukan usaha pengurangan resiko bencana dengan melibatkan anak usia sekolah agar pada situasi bencana, anak-anak memahami terhadap apa yang harus dilakukan.

Resiko bencana diartikan sebagai besarnya kerugian yang mungkin terjadi (kehilangan nyawa, cedera, kerusakan harta dan gangguan terhadap kegiatan ekonomi) yang disebabkan oleh suatu fenomena tertentu (Pribadi, 2007). Adapun kerentanan adalah seberapa besar suatu masyarakat, bangunan, pelayanan atau suatu daerah akan mendapat kerusakan atau terganggu oleh dampak suatu bahaya tertentu, bergantung kepada kondisinya, jenis konstruksi dan kedekatannya kepada suatu daerah yang berbahaya atau rawan bencana. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerentanan adalah:

a) Institusi lokal yang lemah dalam membuat kebijakan dan peraturan serta penegakan kebijakan tersebut, terutama terkait dengan penanggulangan bencana dan upaya pengurangan resiko bencana, termasuk di dalamnya adalah lemahnya aparat penegak hukum; b) Kurangnya penyebaran informasi mengenai kebencanaan, baik melalui penyuluhan, pelatihan serta keahlian khusus yang diperlukan dalam upaya-upaya pengurangan resiko bencana; dan c) Penduduk terkait dengan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat.

Menurut *United Nations-International Strategy for Disaster Reduction* (UN-ISDR), PRB merupakan usaha sadar dan terencana dalam proses pembelajaran untuk memberdayakan peserta didik dalam upaya untuk pengurangan resiko bencana dan membangun budaya budaya aman serta tangguh terhadap bencana (Ariantoni, 2009). PRB direalisasikan dengan mengembangkan motivasi, keterampilan, dan pengetahuan agar dapat bertindak dan mengambil bagian dari upaya untuk pengurangan resiko bencana. Pengurangan resiko bencana yang berkaitan dengan pendidikan, perlu menjadi program prioritas dalam sektor pendidikan yang diwujudkan dalam pendidikan pengurangan resiko di sekolah/madrasah atau dalam sektor pendidikan non-formal seperti mengadakan pembelajaran dalam bentuk pelatihan kepada warga atau karang taruna.

Dalam (Noor, 2014), klasifikasi dalam pengurangan resiko bencana atau Mitigasi adalah sebagai berikut:

1) Mitigasi Struktural

Mitigasi struktural adalah kegiatan dalam prabencana yang bertujuan untuk pembangunan secara fisik. Implementasi yang dapat dilakukan dalam kegiatan

mitigasi struktural seperti pembuatan bangunan pemecah ombak dan dam. Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dalam hal prasarana dalam hal pengurangan risiko bencana (Peraturan Kepala BNPB No.4 Tahun 2008).

2) Mitigasi Non struktural

Mitigasi non struktural adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana dalam hal tata guna lahan yang disesuaikan dengan keadaan wilayah dan tingkat kerentanan wilayah tersebut dan memberlakukan peraturan pembangunan. Tujuan dari kegiatan ini untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana (Sari, 2014). Mitigasi non-struktural dilakukan untuk meningkatkan kemampuan serta penyadaran masyarakat melalui pendidikan dalam hal mengurangi risiko bencana (Peraturan Kepala BNPB No.4 Tahun 2008).

Kemudian, komponen-komponen pengurangan risiko bencana atau (PRB) menurut (UNISDR, 2015), adalah sebagai berikut:

- 1) Kesadaran penilaian risiko, yang didalamnya terdapat analisis ancaman serta analisis kapasitas dan kerentanan.
- 2) Meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan, pelatihan, penelitian, dan informasi.
- 3) Terdapat komitmen kebijakan dan kerangka kelembagaan.
- 4) Melakukan pengelolaan lingkungan, tata guna lahan, perencanaan perkotaan, proteksi fasilitas-fasilitas sosial, penerapan ilmu dan teknologi (penerapan ilmu dan teknologi dapat mengurangi risiko bencana gunung api), kemitraan jejaring, dan instrumen keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis deskriptif bertujuan menjawab atas pertanyaan-pertanyaan tentang siapa, apa, kapan, dimana dan bagaimana keterkaitan dengan penelitian tertentu. Penelitian deskriptif digunakan untuk memperoleh informasi mengenai variabel atau kondisi suatu situasi. Penelitian deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus yang memiliki ciri-ciri memusatkan diri pada unit tertentu dalam berbagai fenomena (Bungin, 2012). Olehnya dalam menganalisis data penelitian ini yaitu untuk menggambarkan keadaan atau fenomena berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau nyata. Sebagaimana adanya, maka dalam menganalisis data yang berhasil dikumpulkan, tidak diuji statistik, melainkan non statistik sesuai dengan penelitian deskriptif.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang diambil dari penelitian ini adalah fokus pada variabel kebijakan publik dan pengurangan resiko bencana yang dikhususkan pada bencana banjir. Adapun indicator-indikator variabel fokus penelitian tersebut untuk menjadi dasar penggalan data dalam teks wawancara, adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan kebijakan atau program pengurangan resiko bencana yang

mana disesuaikan dengan kegiatan pengurangan risiko bencana yang tercantum pada pasal 37 ayat 2 Undang-Undang no. 24 Tahun 2007, sebagai berikut:

- a) Pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b) Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c) Pengembangan budaya sadar bencana;
 - d) Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e) Penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
- 2) Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana baik dalam lingkup internal maupun eksternal.
 - 3) Menyusun rekomendasi kebijakan berlandaskan hasil dari kegiatan analisis kebijakan Pengurangan Risiko Bencana yang telah dilakukan yang berpijak pada teori-teori kebijakandan konsep pengurangan risikobencana yang relevan.

3.3 Informan Penelitian

Informan merupakan sasaran objek peneliti yang akan menjadi sumber informasi dalam pengumpulan data-data primer melalui proses observasi dan wawancara lapangan. Target peneliti yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah betul-betul warga yang terlibat langsung dalam kejadian bencana. Dalam hal ini yang dimaksud adalah:

- 1) Representatif dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo.
- 2) Representatif dari Kantor Kepala Desa Banjarasri, Kabupaten Sidoarjo.

Penetapan informan dalam penelitian ini menggunakan cara *purposive*. Penetapan *purposive* yaitu teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu. Peneliti menetapkan informan berdasarkan anggapan bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan peneliti sesuai dengan permasalahan penelitian. Dengan kata lain, informan yang dipilih, baik pengetahuan ataupun keterlibatan mereka dengan permasalahan yang akan diteliti tidak diragukan lagi.

3.4 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di area kantor BPBD Kabupaten Sidoarjo, Kantor Kepala Desa Banjarsari Kabupaten Sidoarjo, dan area sekitar Desa Banjarsari, Kabupaten Sidoarjo. Pemilihan lokasi penelitian ini, didasarkan pada kasus banjir Desa Banjarasri di Kabupaten Sidoarjo yang masih belum selesai penanggulangannya hingga saat ini. Dimana sesuai dengan laporan dari BPBD Kabupaten Sidoarjo (Sidoarjo, 2020), bencana banjir di Kabupaten Sidoarjo mencapai 143 kasus selama Januari hingga Juli 2021 dengan salah satunya melanda Desa banjarasri, pada laporan tersebut juga menyebutkan bahwa hanya pada Bulan November, Desa Banjarasri dilanda banjir hingga lebih dari 3 hari. Dan dipilihnya kantor BPBD dan Kantor Kepala Desa Banjarasri Kabupaten Sidoarjo sebagai lokasi penelitian adalah karena dalam implementasi kebijakan mengenai bencana akan berkaitan dengan kedua lokasi tersebut. sementara pada area Desa Banjarasri sendiri untuk melihat secara langsung dan bertemu dengan korban secara langsung agar mendapat data dari dua arah secara objektif.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder dengan proporsi sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu:

- a) Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung.
- b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, SMS, foto dan lain-lain.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Wawancara langsung yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang objek dan fokus yang diteliti. Dalam melakukan wawancara diperlukan pedoman wawancara (*interview guide*). Pedoman ini merupakan penuntun bagi peneliti dalam mengembangkan pertanyaan yang bersifat terbuka sehingga memberi kebebasan seluas-luasnya bagi informan untuk menyampaikan argumentasinya. Selain pedoman

wawancara, peneliti juga menggunakan alat pendukung lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan reliabilitas hasil wawancara dengan para informan berupa alat tulis dan alat rekam (*tape recorder*) untuk mencatat hasil pengamatan dan wawancara yang terjadi.

- 2) Observasi dalam penelitian ini yaitu sebagai teknik pengumpulan data untuk menjangkau data pada saat kejadian berlangsung. Oleh karena itu, peneliti mengamati interaksi dan percakapan yang terjadi diantara subjek yang diteliti. Sehingga keunggulan metode ini adalah data yang dikumpulkan dalam dua bentuk yaitu interaksi dan percakapan (*conversation*), artinya selain perilaku non verbal, juga mencakup perilaku verbal dari orang-orang yang diamati agar data yang didapatkan dapat menangkap makna dari aktivitas dan perilaku informan.
- 3) Teknik dokumentasi dalam penelitian ini diperlukan untuk mengumpulkan data melalui penelusuran dokumen yang terkait dengan fokus penelitian, baik dalam bentuk dokumen surat keputusan, literatur ilmiah, artikel, koran, buletin, jurnal, laporan, album foto, dan dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian.

3.7 Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelolah data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa dan menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang terdapat komponen pokok, menurut Miles Huberman dan

Saldana dalam (Saldana, 2014) keempat komponen tersebut yaitu :

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

2) Reduksi Data

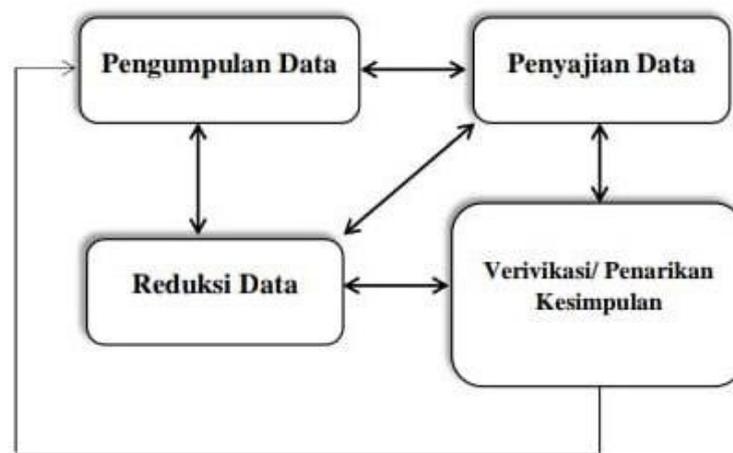
Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi.

3) Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk CW (Catatan Wawancara), CL (Catatan Lapangan) dan CD (Catatan Dokumentasi). Data yang sudah disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi diberi kode data untuk mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Masing-masing data yang sudah diberi kode dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks.

4) Penarikan Kesimpulan/verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.



Gambar 3.3 Komponen Analisis Data

Sumber : Saldana, 2014

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

4.1.1 Desa Banjarasri

Desa Banjarasri merupakan desa yang terletak di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Menurut data dari BPS Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021, luas wilayah dari desa ini adalah 233,41 Hektar dengan ketinggian wilayah 4 M. pada wilayah Desa Banjarasri, terdapat tanah sawah dengan luas 100 ha dan tanah kerigan seluas 117,5 ha. Pada Desa ini terdapat 2309 penduduk dengan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani, dan buruh swasta. Adapun jumlah warga yang memiliki pekerjaan sebagai petani adalah 114 penduduk, sementara buruh tani sebanyak 120 penduduk, dan buruh swasta sebanyak 352 penduduk.

Desa Banjarasri merupakan satu dari tiga Desa di Kabupaten Sidoarjo yang sangat rawan terjadi bencana banjir. Pada Desa Banjarasri sendiri, kejadian bencana banjir ini sudah berjalan cukup lama sejak tahun 2019 lalu. Hal ini dilansir dikarenakan kondisi struktur tanah yang kurang dapat menyerap air dengan baik, tidak adanya drainase yang cukup, serta bentuk daerahnya yang cembung, sehingga sangat rentan untuk menampung air. Sehingga meskipun bukan musim penghujan pun, ketika tidak ada bantuan untuk penyedotan air di sana, genangan banjir akan tetap ada sampai musim kemarau. Hal ini tentu berdampak sangat besar bagi warga Desa Banjarasri, terutama mayoritas pekerjaan penduduk yang

merupakan petani atau buruh tani. Dalam penanggulangan banjir di sini, BPBD berperan banyak untuk memberikan bantuan-bantuan darurat. Sehingga dalam penelitian ini, selain fokus pada Desa Banjarasri, peneliti juga menjadikan BPBD Kabupaten Sidoarjo sebagai objek penelitian dalam melihat kebijakan-kebijakan pengurangan resiko bencana dari sisi pemerintah.

Penetapan batas wilayah Desa Banjarasri ditandai dari Desa Banjarpanji di bagian utara, kemudian di bagian selatan dibatasi oleh Desa Penatarsewu, pada bagian timur dibatasi oleh Desa Plumbon, dan pada bagian barat dibatasi oleh Desa Kedungbanteng. Dari batasan-batasan wilayah tersebut, Desa Banjarpanji dan Desa Kedungbanteng juga merupakan desa-desa yang terdampak banjir sehingga tampak bahwa posisi Desa Banjarasri diapit oleh desa-desa rawan banjir yang kemudian juga berdampak pada desa Banjarasri sendiri. pada potensi pertanahannya pun, luas wilayah tanah Desa Banjarasri jika diklasifikasikan menurut penggunaan dapat dipaparkan pada tabel berikut.

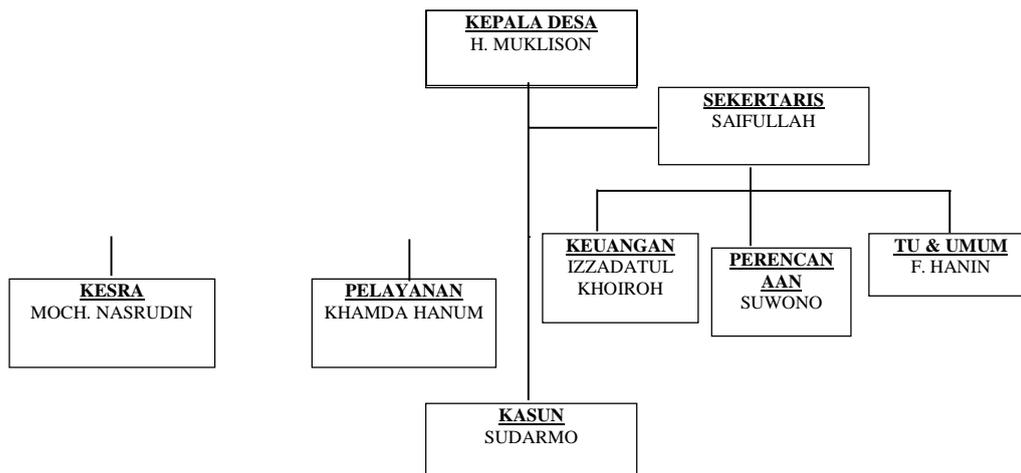
Tabel 4.2 Luas Wilayah Menurut Penggunaan

Jenis tanah	Luas tanah
Tanah sawah	110,92 Ha
Tanah kering	123,63 Ha
Tanah Fasilitas Umum	8,10 Ha
Total	242,65 Ha

Sumber : Profil Desa Banjarasri Tahun 2021 (Data Potensi dan Perkembangan Desa Banjarasri)

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa luas wilayah yang digunakan pada Desa Banjarasri adalah seluas 242,65 Ha yang didominasi oleh tanah kering dan tanah sawah. Hal ini juga selaras dengan mata pencaharian dari masyarakat Desa Banjarasri yang memang adalah petani.

Dalam pengelolaan desa, tentu perlu adalah birkorasi dari pemerintahan yang terstruktur. Adapun struktur organisasi Pemerintah Desa Banjarasri adalah sebagai berikut.



Gambar 4.4 Struktur Organisasi

Sumber : Dokumentasi di Kantor Kepala Desa Banjarasri

4.1.2 BPBD Kabupaten Sidoarjo

BPBD Kabupaten Sidoarjo atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Sidoarjo, berdiri pada tanggal 13 Desember 2011 didasari oleh dasar hukum pendirian SKPD yaitu Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo. Adapun tugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat,

rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- 2) Menetapkan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- 4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ;
- 5) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap satu bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam dalam kondisi darurat bencana;
- 6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan untuk bencana berupa uang maupun barang;
- 7) Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD;
- 8) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Selain itu, Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo juga memiliki dua fungsi secara umum yaitu: 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Visi dari BPBD Kabupaten Sidoarjo adalah untuk mewujudkan penanggulangan bencana secara cepat, tepat, efektif, dan efisien. Sementara misinya adalah: 1) meningkatkan kemampuan kelembagaan pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di Jawa Timur; 2) meningkatkan sarana dan prasarana pelaksanaan, koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana; dan 3) meminimalkan korban jiwa dan kerugian harta benda akibat terjadinya

bencana. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, BPBD Kabupaten Sidoarjo memiliki strategi dalam melakukan prioritas pada lingkungan hidup dan pengelolaan bencana yang mana diarahkan pada:

- 1) Pengurangan risiko bencana (Nasional/Daerah).
- 2) Penguatan Kapasitas Penanggulangan Bencana (PB).
- 3) Optimalisasi Instrument pengendalian, pemanfaatan ruang dalam Pengurangan Risiko Bencana.
- 4) Mendorong partisipasi masyarakat dalam PB.
- 5) Peningkatan Sumber daya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan.
- 6) Pemulihan wilayah terdampak.

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang dapat memperlihatkan adanya pembagian tugas, alur pendelegasian, dan alur pelaporan/ pertanggung jawaban atas tugas/ kewajiban yang dilakukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Sidoarjo. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kekacauan dalam menjalankan tugas masing-masing dan untuk membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan teratur dan baik, guna mencapai tujuan yang diharapkan dapat maksimal. Pembagian tugas dalam struktur organisasi haruslah diatur dengan baik dan terkoordinir sehingga dapat membantu tercapainya tujuan organisasi. Hal ini akan memudahkan setiap masing-masing seksi untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai posisi suatu organisasi yang nantinya akan memudahkan untuk mencapai tujuan.

Adapun urutan organisasi struktural dalam Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1) KEPALA

Nama : Drs. Achmad Zaini, MM
NIP : 19640131 199103 1 002
Pangkat : Pembina Utama Madya (IV/d)
Eselon : II.a

2) KEPALA PELAKSANA

Nama : Ir. Dwidjo Prawito, M. MT.
NIP : 19651012 199202 1 001
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
Eselon : II.b

3) SEKERTARIS

Nama : Mamet Edy Mulyanto, S.Sos
NIP : 19641001 199302 1 001
Pangkat : Pembina (IV/a)
Eselon : III/b

4) KASUBBAG. UMUM

Nama : DYAH PURNAMASARI. S.Si, MT.
NIP : 19700525 199803 2 003
Pangkat : Penata Tk.I (III/d)
Eselon : IV.a

5) KASUBBAG. KEUANGAN

Nama : SRI UTAMI. SE.
NIP : 19840821 201001 2 025
Pangkat : Penata (III/c)
Eselon : IV.a

6) KASUBBAG. KEPEGAWAIAN

Nama : ENDANG PARYATI, S.H.
NIP : 9690227 199103 2 010

Pangkat : Penata Tk.I (III/d)

Eselon : IV.a

7) KABID PEMADAM KEBAKARAN

Nama : NAWARI, SH, S.Sos., MM

NIP : 196805031993031008

Pangkat : Pembina (IV/a)

Eselon : III.b

8) KABID. PENCEGAHAN, KEDARURATAN, DAN LOGISTIK

Nama : KARSONO, S.E, M.Ak.

NIP : 19720914 199803 1 004

Pangkat : Pembina (IV/a)

Eselon : III.b

9) KABID REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Nama : Ir. YUDHI KARTIKAWAN, M.T.

NIP : 196804171998031008

Pangkat : Pembina (IV/a)

Eselon : III.b

4.2 Hasil Temuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan analisis hasil penelitian yang didapat dari lapangan dengan cara teknik-teknik pengumpulan data yang telah dipaparkan di atas yang kemudian di analisis dengan acuan teori yang digunakan. Pembahasan ini berisi tentang bagaimana kebijakan Pengurangan Risiko Bencana di Wilayah Rawan Banjir untuk studi kasus pada Desa Banjarasri, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Dalam menganalisis kebijakan terkait Pengurangan Resiko Bencana banjir, peneliti memfokuskan penelitian pada tiga hal yaitu, pertama, hasil olahan data difokuskan pada pelaksanaan kebijakan atau program pengurangan resiko bencana

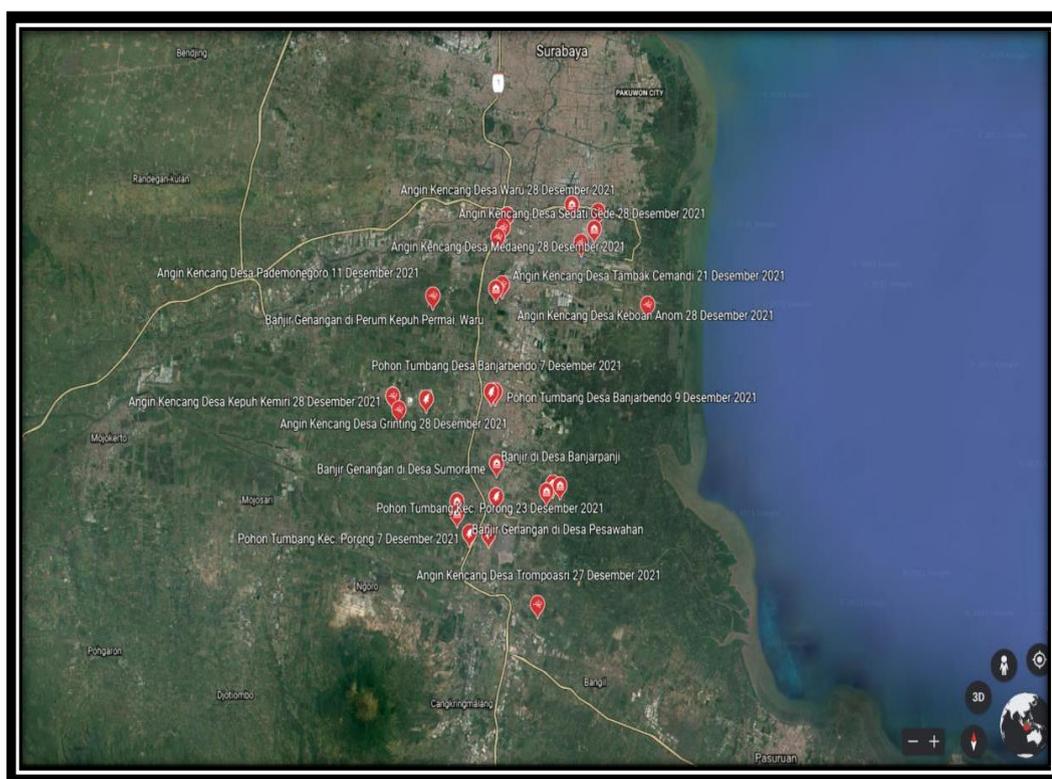
yang mana disesuaikan dengan kegiatan pengurangan resiko bencana yang tercantum pada pasal 37 ayat 2 Undang-Undang no. 24 Tahun 2007, yang mana meliputi: a) pengenalan dan pemantauan risiko bencana; b) perencanaan partisipatif penanggulangan bencana; c) pengembangan budaya sadar bencana; d) peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan e) penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana. Kemudian selain itu, peneliti juga fokus pada meneliti implementasi kebijakan, dengan mencari tahu apa saja faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana di Desa Banjarasri, Kabupaten Sidoarjo. Faktor internal maupun eksternal, dan faktor penghambat maupun faktor pendukung. Yang mana, dari kedua fokus tersebut kemudian peneliti hendak menyusun rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan kondisi factual lapangan serta teori-teori kebijakan serta konsep pengurangan risiko bencana yang relevan.

Pada penelitian ini, dilakukan dengan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara melakukan wawancara pada pihak BPBD Kabupaten Sidoarjo dan pihak Pemerintahan Desa Banjarasri yang kemudian hasil dari wawancara tersebut diolah dengan cara menyajikan data catatan wawancara yang terlampir dan melakukan koordinasi data yang kemudian hasilnya disajikan pada poin-poin berikut ini.

4.2.1 Kondisi Bencana Banjir di Desa Banjarasri

Dalam laporan BPBD mengenai bencana dan penanganan yang dilakukan sepanjang tahun 2021, didapatkan bahwa pada bulan Desember 2021 terjadi banjir genangan di 5 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, salah satunya

adalah di Kecamatan Tanggulangin tepatnya pada Desa Banjarasri di tanggal 7 Desember 2021. Banjir genangan di daerah Desa Banjarasri pada bulan Desember kemarin dikarenakan curah hujan yang tinggi serta dalam waktu lama mengakibatkan saluran air tidak dapat menampung air hujan kemudian penanganan secara cepat dilakukan pengurukan yang akhirnya mendapatkan *output* surutnya genangan air dalam beberapa hari. Berikut adalah pemetaan kejadian bencana pada Bulan Desember 2021 di Kabupten Sidoarjo.

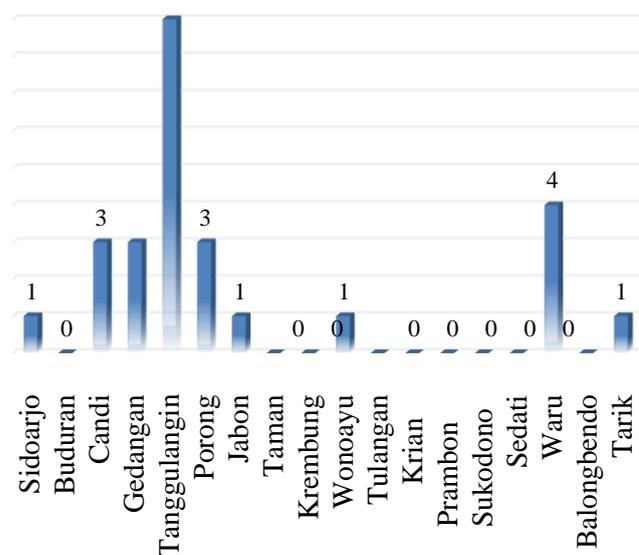


Gambar 4.5 pemetaan kejadian bencana Bulan Desember 2021

Sumber : BPBD Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan pemetaan di atas, dapat diketahui bahwa banjir genangan masih terjadi hingga akhir tahun 2021 dan masih menggenangi tiga daerah tersebut, termasuk desa Banjarasri. Dari titik yang tampak pada peta di atas, terlihat bahwa

titik terjadinya banjir genangan cukup berhimpitan dan dekat satu sama lain. Pada Kecamatan Tanggulangin, berlokasinya Desa Banjarasri merupakan daerah yang rawan sekali terkena banjir. Hal ini juga ditunjukkan dari diagram batang ringkasan bencana banjir genangan yang terjadi sepanjang tahun 2021, dimana Kecamatan Tanggulangin menempati posisi paling sering terjadi banjir genangan.



Gambar 4.6 ringkasan Kejadian Banjir Genangan Tahun 2021

Sumber : BPBD Kabupaten Sidoarjo

Melihat dari diagram di atas, dapat dilihat bahwa kejadian banjir yang paling sering terjadi di Kecamatan Tanggulangin dimana jika dibandingkan dengan daerah lain, masih terlampau jauh perbandingannya, dikarenakan sepanjang tahun 2021 sudah terjadi 9 kali kasus banjir genangan terjadi di Kecamatan Tanggulangin. Secara lebih mendetil pada kondisi di Desa Banjarasri, berikut adalah table kejadian banjir genangan yang terjadi di Desa Banjarasri pada Bulan Desember 2021.

Table 4.3 Monitoring Bencana Banjir Desa Banjarasri

DESA	LOKASI RT/RW	Jumlah KK	Ketinggian genangan (CM)												KET		
			7 Des	9 Des	11 Des		12 Des		13 Des		14 Des		21 Des	23 Des		24 Des	
			09.00 WIB	15.00 WIB	15.00 WIB	20.15 WIB	13.00 WIB	20.00 WIB	10.30 WIB	20.30 WIB	14.00 WIB	20.00 WIB	20.50 WIB	12.30 WIB		12.00 WIB	20.00 WIB
Banjarasri	RT 08 RW 02	45 rumah, 55 KK, 188 jiwa.	3-7	5-15	20	5	4	Surut	3	3	Surut		8	6	2	Surut	Pembangunan DAM di Desa Banjarpanji baru, pemasangan batu kali di satu sisi belum selesai, banyak material di dalam sungai dan sampah.
	RT 09 RW 03	21 rumah, 27 KK, 91 jiwa	3-7	5-15	20	5	4	Surut					5		5	Surut	Untuk normalisasi sungai gedangrowo belum dilakukan secara penuh masih banyak material sampah dan eceng gondok di sungai.
	RT 05 RW 02											5	48				
	RT 08 RW 03				5		Surut										Pembangunan kisdam (Banjarpanji belakang timur sendiri) belum dilakukan

Sumber : BPBD Kabupaten Sidoarjo

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pada bulan Desember lalu genangan paling tinggi terjadi pada tanggal 11 Desember 2021, hingga mencapai 20 CM yang kemudian sempat surut sebelum kembali menggenang pada akhir

bulan Desember 2021. Pada table keterangan merupakan gambaran situasi yang terjadi pada saat bencana terjadi yang meliputi kendala seperti belum dilakukannya pembangunan kisdam di area timur Banjarpanji, ,belum berjalannya pembangunan pompa air, serta kondisi dam yang berperan sebagai pelimpah belum selesai dibangun.

4.2.2 Implementasi Kebijakan Pengurangan Resiko Bencana Sesuai UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 37 Ayat 2

Berkaitan dengan implementasi Pengurangan Resiko Bencana, pokok utama dari implementasi Pengurangan Resiko Bencana ini diantaranya ialah upaya mencegah terjadinya peristiwa alam yang merugikan atau mengurangi kecepatannya dan upaya mengurangi kerentanan manusia. Karena risiko bencana hadir dari akumulasi semakin tinggi bahaya dan kerentanan serta ketidakmampuan, maka semakin besar risiko bencana yang dihadapi. Selain itu, beberapa komponen utama untuk menyukseskan pengurangan risiko bencana (PRB) yaitu, membangun kesadaran, pengembangan pengetahuan, komitmen kebijakan dan kepemimpinan sebagai faktor utama, penerapan kaidah-kaidah standar PRB, dan peran serta partisipasi masyarakat. Program Pengurangan Risiko Bencana banjir tidak akan berjalan hanya dengan kekuatan pemerintah pusat sebagai penggagas, untuk itu dibutuhkan dukungan dan tindakan nyata lembaga dan institusi terkait sesuai peran dan fungsi masing-masing. Melalui Kebijakan yang tercantum pada UU No. 24 Tahun 2007 tentang kegiatan pengurangan risiko bencana, terdapat poin-poin yang akan dipaparkan dibawah ini.

1) Pengenalan dan Pemantauan Risiko Bencana

Pengenalan dan pemantauan risiko bencana merupakan salah satu bentuk dari implementasi kebijakan kegiatan pengurangan risiko bencana dalam UU No. 24 Tahun 2007. Pemantauan risiko bencana dapat dilakukan dengan cara pemantauan daerah rawan bencana dan pembuatan peta rawan bencana yang mana hal tersebut dapat dilakukan oleh BPBD. Pada situasi bencana banjir di Desa Banjarasri, pemantauan risiko bencana yang dilakukan oleh BPBD adalah dengan cara melakukan kajian teknis dengan menggandeng ahli bencana dari ITS (Institut Teknologi Sepuluh November) Surabaya, sebagaimana yang disampaikan oleh pihak BPBD berikut ini.

“program pertama yang dilakukan adalah melakukan kajian teknis bersama ITS, terkait mengetahui penyebabnya itu apa untuk sebagai dasar penyusunan penanganan darurat. Kemudian didapatkan penyebabnya adanya subsiden, jadi ada penurunan tanah terus menerus yang mana penyebab dari subsiden itu belum tahu apa.” (KABID Pencegahan, Kedaruratan, & Logistik BPBD; 12/01/2022).

Dari kajian teknis yang dilakukan, hasil yang ditemui adalah adanya penurunan tanah serta bentuk tanah yang ada di Desa Banjarasri yang sulit untuk menyerap air, selain itu, didapatkan pula dari kajian teknis yang telah dilakukan bahwa bentuk dari desa tersebut seperti mangkok sehingga air tertampung di dalam sana dan sulit untuk keluar.

“Disana struktur tanahnya itu lempung, kayak tanah liat, jadi susah untuk menyerap air. Terus juga bentuknya kayak mangkok, jadi air itu masuk ke dalam sini. Makanya setelah diuruk itu jadi bisa mengurangi risiko peluapan banjir yang lebih besar lagi.” (KABID Pencegahan, Kedaruratan, & Logistik BPBD; 12/01/2022).

Selain itu, pemantauan risiko bencana yang dilakukan adalah dengan menyinergikan posko-posko bencana di setiap daerah rawan bencana, sehingga ketika BPBD sudah menurunkan keputusan kondisi siaga, relawan-relawan desa

akan segera mengondisikan daerah dengan kondisi siap siaga bencana.

“Di sana itu tanahnya kan memang semakin lama semakin turun kan mbak, tanahnya itu. Kalau memang sudah masuk musim penghujan kita langsung turunkan situasi siaga bencana di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Nah, setelah SK itu naik, pasti adanya posko induk itu adalah posko untuk penanganan darurat jadi yang dari posko-posko itu kalau banjir datang nanti bisa langsung turun ke sana.” (KABID Pencegahan, Kedaruratan, & Logistik BPBD; 12/01/2022).

Hal ini juga dikonfirmasi oleh pihak Desa bahwa pembentukan posko-posko siaga itu memang ada dan kajian teknis itu memang terjadi untuk melakukan penelitian mengenai asal muasal dari datangnya bencana banjir tersebut. Namun di lain sisi, warga menaruh kecurigaan pada kebenaran hasil kajian teknis, karena menurut warga penurunan tanah itu terjadi sejak adanya pengeboran dari salah satu perusahaan swasta di sumur-sumur yang berada di kawasan Desa Banjarasri.

“Iya mbak, memang ada anak-anak dari ITS yang melakukan penelitian di sini untuk melihat keadaan tanah di sini, katanya ada penurunan. Tapi kalau dari kami itu berpikir penurunan ini ada karena adanya pengeboran dari PT W**** karena dulu itu hujan seperti apapun nggak ada penurunan tanah. Tapi kok setelah PT W**** melakukan pengeboran di beberapa sumur jadinya banjir seperti ini. Tapi pihak PT itu selalu mengelak kalau kita berpendapat demikian.” (Seksi Perencanaan; 13/01/2022).

Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan yang dikaitkan dengan pengenalan dan pemantauan risiko bencana banjir pada Desa Banjarasri oleh BPBD sudah dilakukan dengan baik karena sudah meliputi adanya kajian teknis serta pembentukan posko-posko untuk memantau adanya risiko bencana banjir yang mungkin akan terjadi. Masyarakat juga dengan kooperatif turut menjadi relawan pada posko-posko tersebut dan turut membantu BPBD untuk melakukan pengurangan risiko bencana banjir. Namun di lain sisi, masyarakat masih menyayangkan adanya kurang transparansi dari pihak PT terkait

serta hasil penelitian yang menurut mereka masih kurang tepat karena masyarakat merasa bentuk tanah mereka sebetulnya baik-baik saja sebelum pengeboran itu terjadi.

Selain itu, salah satu bentuk pemantauan daerah risiko bencana adalah dengan melakukan pemetaan daerah-daerah potensi banjir sebagai berikut.



Gambar 4.7 Peta prakiraan Daerah Potensi Banjir Jawa Timur 2022

Sumber: BPBD Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan peta prakiraan di atas, dapat ditunjukkan bahwa daerah dengan warna merah memiliki potensi rawan banjir yang tinggi, jika kuning berpotensi menengah, hijau berpotensi rendah, coklat berpotensi aman, serta putih tidak ada potensi banjir. Jika dilihat dari peta prakiraan tersebut, untuk tahun 2022, diperkirakan potensi banjir pada daerah Sidoarjo di posisi warna hijau, yaitu berpotensi rendah. Adanya peta prakiraan ini bisa menjadi salah satu pegangan bagi BPBD dalam melakukan persiapan untuk menyiapkan penanganan

dalam menghadapi resiko bencana banjir.

Dalam mengidentifikasi potensi resiko bencana sebagai salah satu upaya untuk pengurangan resiko bencana, BPBD Kabupaten Sidoarjo melakukan proses pengkajian risiko bencana dengan menekankan pada beberapa prinsip sebagai berikut:

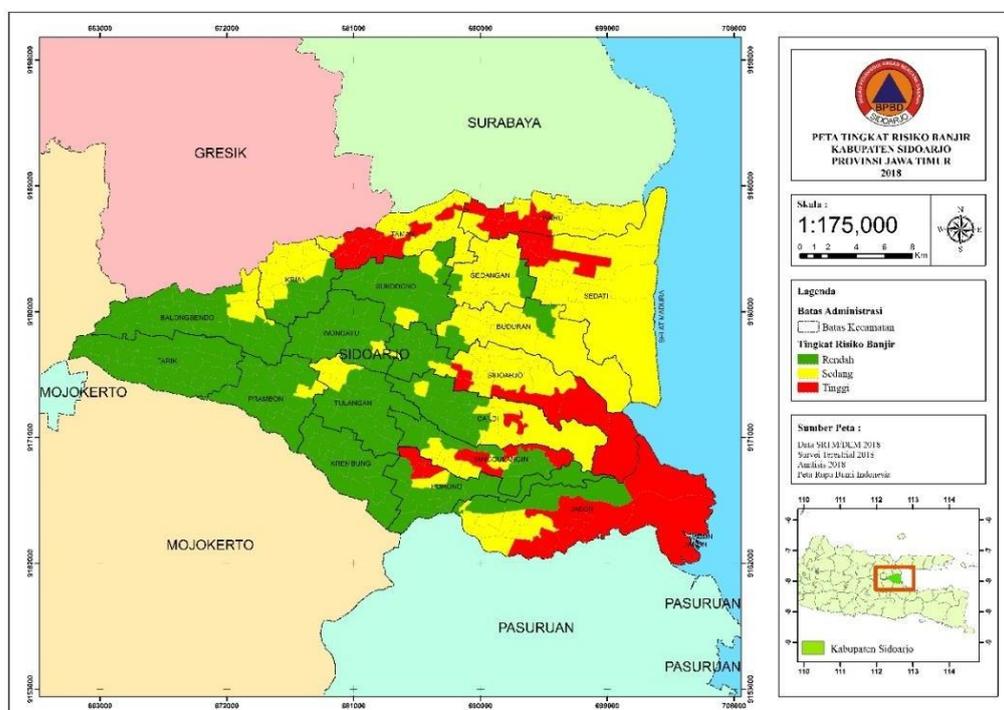
- 1) Menggunakan data dan segala bentuk rekaman kejadian yang ada, dengan mengutamakan data resmi dari lembaga yang berwenang.
- 2) Melakukan integrasi analisis probabilitas kejadian ancaman dari para ahli dengan kearifan lokal masyarakat;
- 3) Hasil kajian risiko dapat diterjemahkan menjadi kebijakan umum untuk pengurangan risiko bencana.

Pengkajian potensi risiko bencana di Kabupaten Sidoarjo disusun berdasarkan komponen-komponen yang mempengaruhi munculnya risikobencana, yaitu bahaya, kerentanan, kapasitas dan risiko bencana. Komponen bahaya disusun berdasarkan parameter intensitas dan probabilitas kejadian. Komponen kerugian disusun berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Komponen kapasitas disusun berdasarkan parameter sebagai berikut :

- 1) Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan
- 2) Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
- 3) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik.
- 4) Penanganan Terpadu Kawasan Rawan Bencana.
- 5) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana.
- 6) Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana.

7) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

Pada bencana banjir, parameter-parameter yang termasuk dalam kajian potensi resiko bencana adalah daerah rawan banjir dan kemiringan lereng, jarak dari sungai, serta curah hujan. Yang kemudian setelah dianalisis menggunakan parameter-parameter tersebut, terbentuklah pemetaan potensi terjadinya bahaya banjir di Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut.



Gambar 4.8 Peta Potensi Risiko Bencana Banjir

Sumber : BPBD Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa desa dengan warna merah merupakan daerah dengan potensi risiko bencana tinggi, desa dengan warna kuning merupakan daerah dengan potensi risiko bencana sedang, dan desa dengan warna hijau merupakan daerah dengan potensi risiko bencana rendah. Penentuan zona rawan banjir tersebut selain didasarkan pada historis bencana yang sudah

ada, juga didasarkan pada daerah dengan curah hujan tinggi, jenis tanah, dan kemiringan lereng sehingga dapat ditentukan daerah yang memiliki kerentanan bencana banjir yang kemudian dapat digunakan pemerintah dalam menentukan daerah dengan prioritas penanganan bencana untuk mengurangi risiko bencana banjir.

Dari paparan temuan penelitian di atas, kemudian dapat diketahui bahwa BPBD Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi manajemen bencana yang baik, sebagaimana disampaikan oleh Nurjanah (2012) bahwa dalam menanggulangi bencana, diperlukan manajemen bencana yang baik, terutama pada tahapan pra bencana untuk mengurangi resiko bencana agar tidak lebih parah lagi. adapun dari paparan data tersebut, dapat diketahui bahwa BPBD Kabupaten Sidoarjo telah melakukan tahapan pencegahan serta kesiapsiagaan yang baik. Pencegahan merupakan upaya yang dilakukana untuk mencegah terjadinya bencana (jika mungkin dengan meniadakan bahaya) (Nurjanah, 2012). Cerminan sikap pencegahan yang baik dilakukan oleh pihak BPBD dengan mulanya melakukan pengkajian yang kemudian ditemukan bahwa kondisi tanah serta banyaknya rumah- rumah yang dibangun tanpa izin di lokasi-lokasi tanah resapan membuat kawasan Desa Banjarasri tersebut menjadi rawan banjir, sehingga pihak BPBD melakukan pencegahan agar tidak semakin parah dengan melakukan pengurukan serta melarang warga untuk melakukan pemabngunan di tanah resapan. Selain itu, salah satu tahapan pra bencana menurut Nurjanah (2012) adalah kesiapsiagaan atau *preparedness* yang mana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang

tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan yang dilakukan oleh pihak BPBD adalah selain menyusun pemetaan titik-titik rawan banjir, juga membentuk posko-posko darurat bencana.

4.2.3 Perencanaan Partisipatif Penanggulangan Bencana

Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang atau sekelompok masyarakat dalam suatu kegiatan secara sadar. Menurut Neswtrom (2004) Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional dari orang dalam situasi kelompok dimana mereka berkontribusi pada tujuan kelompok dan juga berbagai tanggung jawab dalam mencapai tujuan. Dalam penanggulangan bencana, partisipasi dari banyak pihak juga sangat dibutuhkan agar dapat membentuk sinergi yang kokoh untuk melakukan pengurangan risiko bencana. Hal ini dikarenakan keberhasilan suatu program, tergantung pada keterlibatan atau partisipasi dari banyak pihak, termasuk masyarakat yang terbentuk pada komunitas khusus agar memiliki tujuan dan fungsi yang lebih fokus. Selain itu juga alat-alat pemerintahan seperti anggota Dewan, kepala daerah, Kepala Desa, dan sebagainya, juga perlu turut kooperatif dalam bersama-sama melaksanakan penanggulangan bencana.

BPBD Kabupaten Sidoarjo, telah berhasil menyinergikan banyak pihak untuk menanggulangi bencana yaitu dengan membentuk posko-posko bencana dengan memberikan edukasi tanggap bencana pada relawan-relawan yang mau melakukan piket di posko-posko lapangan tersebut dalam melakukan pemantauan bencana dan penanggulangan bencana. Anggota Dewan dan Bupati Sidoarjo dalam hal ini juga turut melakukan partisipasinya dalam memberikan dana

bantuan seperti dari dana APBN maupun bantuan langsung dari Bupati yang kemudian akan disalurkan BPBD pada korban bencana untuk menanggulangi bencana tersebut. selain itu, Pemerintahan kabupaten Sidoarjo juga telah membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Sidoarjo untuk meminimalisir risiko terjadinya bencana, peran dari forum ini untuk memberikan sosialisasi, dalam persiapan SOP penanganan bencana maupun memberikan saran dan masukan terkait kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah daerah maupun kecamatan dan desa dalam menghadapi suatu bencana.

“sebagai salah satu bantuan dukungan yang kami punya itu adanya FPRB itu mbak. Dimana didalamnya itu ada dari anggota dewan, masyarakat, Bupati, media, pengusaha-pengusaha. Jadi semuanya bersinergi di sana untuk memberikan bantuan pada pengembangan penanggulangan bencana ini. kami juga menggandeng ITS sebagai partner dalam melakukan kajian teknis karena ITS memiliki keahlian, di sana juga ada ahli bencana namanya Pak Amin Widodo. Sehingga di Desa Banjarasri itu kajiannya dilakukan oleh ITS dengan pendampingan dari BPBD.” (KABID Pencegahan, Kedaruratan, & Logistik BPBD; 12/01/2022).

4.2.4 Pengembangan Budaya Sadar Bencana

Pengembangan budaya sadar bencana ini juga berkaitan dengan pembentukan masyarakat sadar bencana. Hal ini berkaitan dengan edukasi- edukasi kebencanaan yang diberikan oleh BPBD atau Pemerintah kepada masyarakat agar masyarakat lebih siap dan lebihsiaga dalam menghadapi bencana. adapun pada BPBD Kabupaten Sidoarjo, dalam mewujudkan masyarakat sadar bencana di Desa Banjarasri, dilakukan dengan cara melakukan edukasi pada relawan-relawan posko lapangan agar dapat lebih siap siaga dalam menghadapi bencana banjir. Sebetulnya, pihak BPBD juga sudah memiliki rencana untuk membentuk desa tangguh bencana di Desa Banjarasri namun dikarenakan adanya

wabah covid-19 membuat dana yang mulanya akan dialirkan pada pembentukan Desa Tangguh menjadi di *re-focusing* ke arah bencana wabah *covid-19*.

“Iya, ada, temen-temen dari 3 desa yang terdampak banjir itu kita berikan pelatihan mengenai kebencanaan untuk menjadi relawan. Termasuk desa Banjarasri juga. Sebetulnya awalnya kita mau desa tangguh, tapi karena *re-focusing* tadi jadinya kita arahkan ke pemberian pelatihan untuk menangani bencana sebagai relawan.” (KABID Pencegahan, Kedaruratan, & Logistik BPBD; 12/01/2022).

Selain itu, BPBD juga melakukan edukasi tanggap bencana pada masyarakat Desa. Hal ini dikarenakan meskipun ada relawan di posko-posko lapangan, namun tidak mungkin relawan-relawan tersebut dapat berjaga 24 jam nonstop. Sehingga bagaimana pun warga juga turut bergantian berjaga di Posko Lapangan, yang manatentunya BPBD juga perlu turut memberikan edukasi pada masyarakat pula.

“Selama penanganan darurat, di sana ada posko lapangan. Nah, itu melibatkan masyarakat, tidak hanya melibatkan perangkat desanya karena yang menjaga secara bergantian itu ya masyarakat, jadi masyarakat juga kita edukasi. Namun posko lapangan itu memang adanya pas tanggap darurat, tapi kalau pas nggak musim penghujan seperti saat ini nggak ada karena tidak ada resiko untuk banjir kan kalau tidak hujan.” (KABID Pencegahan, Kedaruratan, & Logistik BPBD; 12/01/2022).

Kooperatif dari masyarakat Desa Banjarasri pun terlihat dari pengakuan dari perangkat Desa bahwa warga Desa Banjarasri dengan baik turut melakukan penanggulangan bencana dengan melakukan pembersihan drainase, membersihkan sungai secara gotong royong, dan melakukan kerja bakti yang mana dikoordinir pada tiap-tiap RT setempat.

“Oya, di sini ada pembersihan selokan, pembersihan sungai, kerja bakti ada semua. Kegiatan gotong royong itu biasanya sebulan sekali masih ada tingkat-tingkat RT.” (Seksi Perencanaan Desa Banjarasri; 13/01/2022).

Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa implemtnasi kebijakan pada pembentukan budaya sadar bencana pada masyarakat Desa

Banjarasri oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo terlihat dari adanya edukasi bencana pada masyarakat dan pelatihan intensif yang diberikan untuk relawan-relawan yang melakukan penjagaan di posko-posko lapangan. Selain itu, pihak BPBD juga memiliki rencana pembangunan desa tangguh di kawasan des Banjarasri, yang meskipun belum terealisasi dikarenakan ada hambatan covid-19.

4.2.5 Peningkatan Komitmen Terhadap Pelaku Penanggulangan Bencana

Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana ini merupakan langkah strategis untuk merangkul, memberdayakan, serta meningkatkan peran serta seluruh pelaku utama dalam penanggulangan bencana mulai dari Pemerintah, masyarakat, serta dalam dunia usaha. Komitmen dperan pemerintah dalam penanggulangan bencana, diwujudkan dengan pembentukan BPBD Kabupaten Sidoarjo yang memiliki Indeks Ketahanan Daerah yang baik. Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencan di wilayah tertentu, baik di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi. Penilaian tersebut merupakan salah satu elemen dalam penyusunan peta kapasitas dan selanjutnya dapat memutakhirkan peta resiko bencana. bagusnya penilaian IKD pada BPBD Kabupaten Sidoarjo, merupakan wujud dari adanya peningkatan komitmen pelaku penanggulangan bencana pada sisi Pemerintahan.

“karena di sini IKD (Indeks Ketahanan Daerah) kita paling baik di Jawa Timur jadi penanganan kita dengan sinergitas antar relawan dan masyarakat jalan semua dengan baik. Untuk pendukugannya kita punya forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten. Penghambatnya itu habmpir tidak ada karena kita itu banyak strategi sih, nggak hanya bersandar pada APBD.” (KABID Pencegahan, Kedaruratan, & Logistik BPBD; 12/01/2022).

Kemudian pada sisi masyarakat, komitmen yang ditunjukkan pada warga

Desa Banjarasri adalah kemauannya untuk senantiasa kooperatif dan turut terjun ke lapangan dalam proses penanggulangan bencana banjir di daerahnya. Perangkat desa tidak pernah lupa dan selalu tetap siaga ketika adanya situasi darurat banjir untuk melakukan edukasi pada masyarakat desa agar selalu siaga dengan mengedukasi agar langsung mematikan kabel-kabel listrik, penyaluran bantuan yang adil dan sesuai, serta turut melakukan kegiatan gotong royong untuk menanggulangi banjir.

“di sini ada pembersihan selokan, pembersihan sungai, kerja bakti ada semua. Kegiatan gotong royong itu biasanya sebulan sekali masih ada tingkat-tingkat RT. Sementara untuk organisasi penanggulangan banjir itu dari pemkab, BPBD itu yang turun langsung ke sini. Bantuan-bantuan ke sini itu dari BPBD. Kalau di sini itu di edukasinya, ketika banjir, warga harus siap siaga, kabel-kabel listrik itu dimatikan, adanya posko-posko itu juga termasuk bentuk siap siaga dari desa. Posko-posko darurat itu juga mengurus pembagian bantuan-bantuan entah sembako, entah untuk bantuan fisik penanggulangan bencana itu yang mengurus dari posko-posko itu.” (Seksi Perencanaan Desa Banjarasri; 13/01/2022).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari kedua pelaku penanggulangan bencana yaitu pemerintah dan masyarakat telah bersinergi untuk meningkatkan komitmen dalam penanggulangan bencana. Hal ini terlihat dari nilai IKD, serta kooperatif dari masyarakat yang turut serta dalam kegiatan penanggulangan banjir. Namun pada pelaku penanggulangan bencana yang lain, yaitu pada dunia usaha, yang mana di sini adalah PT W*** yang melakukan pengeboran di kawasan Desa Banjarasri, warga masih merasa tidak mendapatkan sinergi kerjasama dari PT tersebut karena masih tetap melakukan pengeboran dan merasa tidak bertanggung jawab atas bencana banjir yang terjadi.

4.2.6 Penerapan Upaya Fisik, Nonfisik, dan Pengaturan Penanggulangan Bencana

Penerapan mitigasi merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan dalam menghadapi bencana dengan membangun infrastruktur, meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat. Tahap mitigasi dalam upaya penanggulangan bencana adalah cara yang murah dalam mengurangi akibat bahaya-bahaya yang dihadapi masyarakat dibandingkan dengan tindakan lainnya, seperti evakuasi, rehabilitasi dan rekonstruksi (Faturahman, 2018). Minimal terdapat enam langkah yang bisa diupayakan dalam melakukan mitigasi bencana. Pertama, dengan melakukan upaya-upaya perlindungan kepada kehidupan, infrastruktur dan lingkungan. Kedua, adalah dengan meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat. Ketiga adalah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Keempat, adalah meningkatkan koordinasi dan kapasitas kelembagaan mitigasi bencana. Kelima adalah menyusun payung hukum yang efektif dalam upaya mewujudkan upaya-upaya mitigasi bencana. Keenam adalah mendorong keberlanjutan aktivitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan mitigasi (Jokowinarno, 2011). Dalam penerapan upaya fisik pada penanggulangan bencana banjir di Desa Banjarasri, BPBD telah melakukan bantuan dengan pengadaan pompa air, peninggian jalan, pengerukan lahan, pelebaran drainase, dan lain-lain.

“Mitigasi struktural (penanganan secara fisik) seperti membangun pompa, membuat kisdam itu seperti tembok agar tidak turun airnya. Untuk non-strukturalnya, kita mau merencanakan membuat sekolah tangguh dan desa tangguh di sana. Tetapi karena ada *re-focusing*, semacam penyesuaian

APBD jadinya banyak yang diarahkan ke covid jadi untuk realisasinya masih *on-hold*.” (KABID Pencegahan, Kedaruratan, & Logistik BPBD; 12/01/2022).

Noor (2014) menyatakan bahwa mitigasi struktural merupakan salah satu klasifikasi dalam pengurangan resiko bencana, yaitu merupakan kegiatan dalam prabencana yang bertujuan untuk pembangunan secara fisik. Implementasi yang dapat dilakukan dalam kegiatan mitigasi struktural ada beragam, seperti pembangunan-pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dalam hal prasarana untuk pengurangan resiko bencana. Sementara itu, mitigasi non-struktural merupakan kegiatan yang dilakukan secara terencana dalam hal tata guna lahan yang disesuaikan dengan keadaan wilayah dan tingkat kerentanan wilayah tersebut dan memberlakukan peraturan pembangunan untuk mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan oleh bencana (Noor, 2014).

Sehingga berdasarkan dengan teori tersebut, pelaksanaan mitigasi struktural yang telah dilakukan oleh BPBD di Desa Banjarasri adalah tampak dari pembangunan-pembangunan seperti pembangunan jalan, kisdam, *drainase*, pompa air, pengurukan, toilet *portable*, dan lain-lain, yang mana dalam prosesnya mulanya BPBD menurunkan surat keputusan yang menyatakan situasi tanggap darurat agar pemerintah mencairkan dana untuk merealisasikan pembangunan-pembangunan tersebut. Sementara mitigasi non-struktural yang akan dilakukan oleh BPBD adalah dengan pembautan sekolah tangguh bencana agar dapat tercipta budaya tanggap bencana pada masyarakat. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari mitigasi non-struktural.

“Untuk pra bencana, rencana membuat sekolah dan desa tangguh. Untuk saat bencana, penanganannya menaikkan SK Tanggap Darurat. Jadi sebetulnya kan sebelumnya nggak sebesar ini banjirnya, tapi karena

sekarang sudah cukup besar jadinya penyelesaiannya dengan membuat SK Tanggap Darurat dengan ttd. Bupati untuk mencairkan dana pembiayaan untuk penanganan darurat. Seperti pemompaan, pengurukan, kajian teknis, toilet portable, air bersih, seperti itu juga perlu biaya. Nah hal-hal tersebut itulah yang disebut kebutuhan mendesak, seperti penanganan pertama bencana, sembako, dll.” (KABID Pencegahan, Kedaruratan, & Logistik BPBD; 12/01/2022).

Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh warga, dimana pada pihak Kepala Desa sudah mengiakan adanya bantuan-bantuan tersebut yang hingga saat ini terus diberikan pada masyarakat Desa Banjarasri. Penjelasan detail dari pihak Desa juga pompa air yang diberikan sudah cukup banyak di empat titik dengan akumulasi tigasampai empat pompa di tiap titik tersebut.

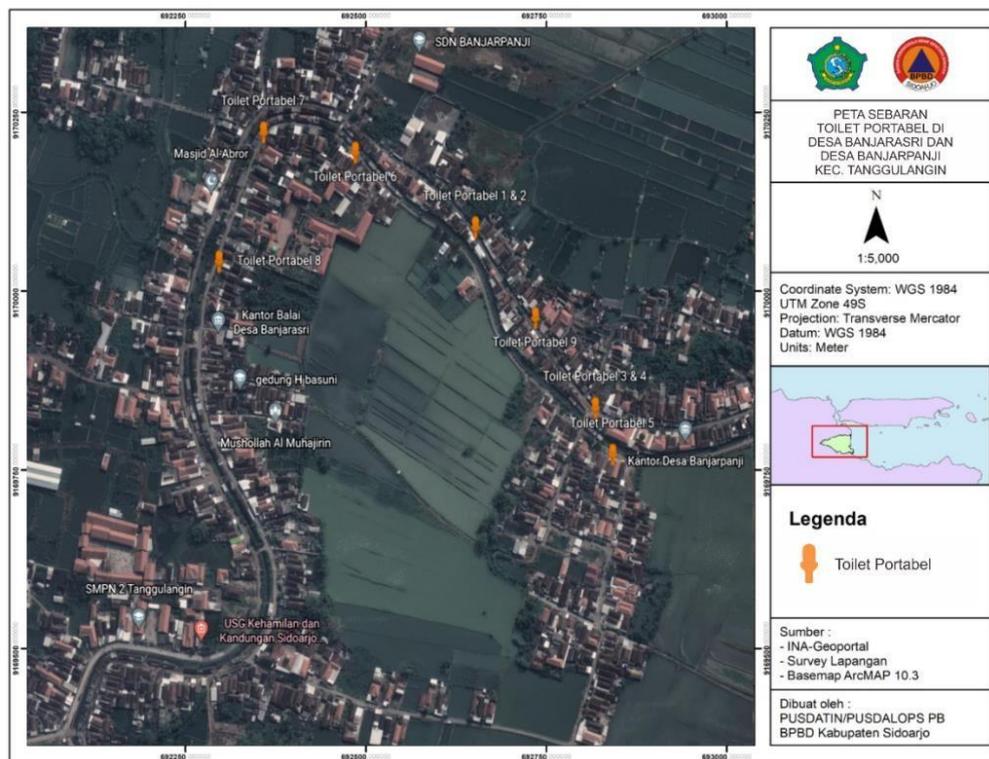
“Ada, untuk pengurangan bencana, itu adanya pengurukan lahan dari warga, termasuk rumah dan jalan. Jadi jalan itu dicor ditinggikan, dipasang drainase (saluran pembuangan air), lalu membuat tembusan-tembusan atau crossing agar pengaliran air bisa cepat ngalirnya. Lalu pemasangan pompa air juga, di sini ada 4 titik untuk pemasangan itu. Per titik lokasi ada 3 sampai 4 pompa, itu untuk mengurangi banjir. Juga melakukan pembersihan sungai. Ini semua programnya dari pemerintah kabupaten.” (Seksi Perencanaan Desa banjarasri; 13/01/2022).

Meski masyarakat merasa diuntungkan dan bersyukur dengan bantuan-bantuan yang telah diberikan, namun di lain sisi masyarakat juga memiliki kekecewaan pada adanya tindakan-tindakan yang tidak diberitahukan dari awal. Seperti adanya penambahan tinggi jalan ketika warga sudah hamper selesai memperbaiki rumah mereka sesuai dengan hasil pengerukan lahan yang sudah dilakukan sebelumnya. Dengan adanya peninggian jalan lagi, tentu membuat masyarakat kembali harus memperbaiki rumahnya kembali. Selain itu, masyarakat juga berharap agar mitigasi yang dilakukan bisa semaksimal mungkin karena sudah sejak lama kegiatan masyarakat yang sebagian besar adalah bertani menjadi terhalang dan gagal panen karena air yang menggenangi area persawahan, yang mana hal tersebut juga tentunya mempengaruhi kondisi perekonomian warga pula.

“Dengan adanya peninggian jalan dan pengerukan lahan di rumah ini jadi membuat berat di warga, karena warga sudah melakukan renovasi karena pengerukan, lalu tiba-tiba jalan betonnya ditinggikan jadinya kan ini warga harus kembali memperbaiki rumahnya lagi. Selain itu, karena genangan itu masih ada ya mbak, disini itu jadinya pertanian masih nggak normal, karena terus- menerus menggenang meskipun kemarau karena nggak bisa keluar.”(Seksi Perencanaan Desa Banjarasri; 13/01/2022).

Seperti halnya sudah disebutkan oleh warga sebelumnya, salah satu bantuan penanganan dari BPBD secara fisik adalah dengan menyebarkan toilet portable di titik-titik area Desa yang mana hal ini sangat penting untuk menyediakan kebutuhan akan air bersih pada masyarakat yang terdampak genangan banjir.

Berikut adalah peta penyebaran toilet *portable*.

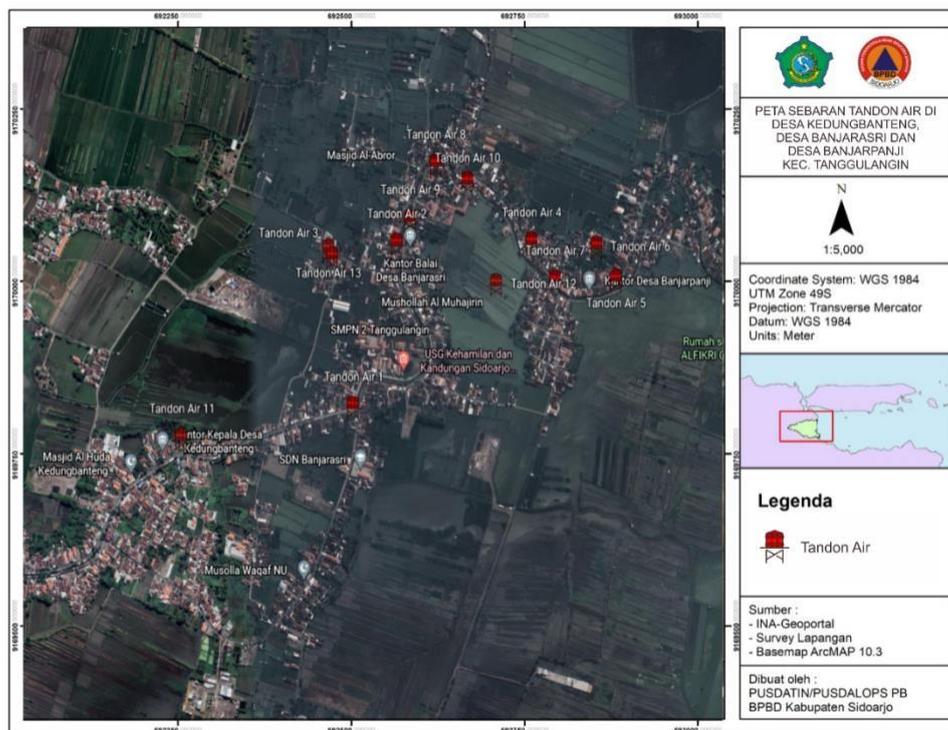


Gambar 4.9 Titik Toilet *Portable*

Sumber : BPBD Kabupaten Sidoarjo

Pada gambar di atas tampak pada tanda yang berwarna *orange* adalah titik-titik penyebaran toilet *portable* di area Desa Banjarasri dan Desa Banjarpanji.

Toilet *portable* merupakan toilet bongkar pasang yang memang menjadi salah satu bantuan sarana dari BPBD pada kawasan terdampak bencana alam. Fungsi dari toilet *portable* ini adalah sebagai pengganti toilet-toilet warga yang mungkin masih tergenang dan air yang mengalir kotor. Sehingga adanya toilet ini dapat membantu masyarakat untuk membersihkan diri dengan air bersih.



Gambar 4.10 Titik Tendon Air

Sumber : BPBD Kabupaten Sidoarjo

Pada gambar di atas merupakan salah satu bantuan fisik dari BPBD pula untuk menangani tanggap darurat bencana, yaitu penyediaan tendon-tendon air untuk air bersih. Titik-titik penyebaran tendon air tampak pada gambar tendon berwarna merah yang tampak menyebar di area Desa Kedung Banteng, Desa Banjarasri, dan Desa Banjarpanji.

4.2.7 Faktor-Faktor Implementasi Kebijakan Pengurangan Resiko Bencana

Dalam jalannya suatu program tentu tidak akan jauh-jauh dari faktor penghambat maupun faktor pendukung. Sama halnya dengan program pengurangan risiko bencana ini juga didapatkan adanya faktor pendukung dan faktor penghambat internal maupun eksternal yang mana akan dipaparkan di bawah ini.

1) Faktor Pendukung

Faktor pendukung dari berjalannya implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana, tentu tidak jauh dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor pendukung ini sendiri merupakan faktor atau aspek-aspek yang dapat mempengaruhi jalannya implementasi suatu kebijakan tertentu agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana banjir di Banjarasri, faktor pendukung yang ada untuk membantu BPBD mewujudkan pelaksanaan kebijakan ini di Desa Banjarasri jika dilihat dari faktor internal adalah adanya dukungan penuh pemerintah dalam mencairkan dana ketika memang Surat Keputusan Tanggap bencana sudah diterbitkan. Selain itu, kinerja dari dalam BPBD juga merupakan faktor pendukung internal yang dapat membantu berjalannya pengurangan risiko bencana yang baik hal tersebut ditunjukkan dengan penyusunan strategi-strategi yang dilakukan oleh BPBD yang tidak bersandar pada dana APBD sehingga ketika terdapat kasus paling buruk dimana dana APBD sulit untuk cair pada saat genting, BPBD memiliki strategi lain dengan melakukan sinergi padapihak-pihak pendukung lainnya.

“Pemerintah itu support sekali ya, seperti ketika memang situasi sedang darurat, jika BPBD menurunkan SK Tanggap Darurat, Bupati

dengan kooperatif menandatangani dan dengan begitu dana bisa cepat turun untuk penanganan bencana. Selain itu, dari dalam kita sendiri itu jugaselalu berusaha untuk berpikir kreatif dan inovatif agar selalu bisa menyusun strategi-strategi yang lebih baik lagi agar tidak terus-terusan mengandalkan APBD saja. Dengan integritas itu, sinergi dari masyarakat juga yang membawa BPBD sini ini jadi BPBD dengan IKD terbaik di Jawa Timur.” (KABID Pencegahan, Kedaruratan, & Logistik BPBD; 12/01/2022).

Selain faktor pendukung internal, jalannya implementasi kebijakan pengurangan resiko bencana juga didukung oleh faktor eksternal atau faktor dari luar instansi. Salah satunya adalah dengan adanya FPRB atau Forum Pengurangan Resiko Bencana di Kabupaten Sidoarjo. FPRB ini dilansir oleh perwakilan BPBD sangat membantu dalam hal pendanaan, kebijakan, serta kerelaannya dalam menangani bencana dan pengurangan resiko bencana.

“Untuk pendukungnya kita punya forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten yang terdiri dari anggota Dewan, juga ada masyarakat, Bupati, ahli-ahli bencana, dan banyak tergabung di situ saling bersinergi untuk membantu pemerintah menangani bencana.” (KABID Pencegahan, Kedaruratan, & Logistik BPBD; 12/01/2022).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung secara internal adalah kinerja BPBD yang baik dan mengedepankan sinergitas dengan masyarakat, bantuan dari para pejabat tinggi seperti Bupati, anggota dewan juga tidak nyandat asal sudah diturunkan SK Tanggap Darurat. Selain itu faktor pendukung eksternalnya ada pada forum atau komunitas-komunitas relawan yang turut membantu keberhasilan penanganan bencana banjir di Desa Banjarasri.

2) Faktor Penghambat

Sama halnya dengan faktor pendukung, faktor penghambat pun juga memiliki faktor yang datangnya dari internal maupun eksternal. Adapun faktor penghambat dari internal, jika pada BPBD tidak merasa ada hambatan yang signifikan selain hambatan alokasi dana dari pusat, yang mana harusnya BPBD bisa

melakukan pembentukan dan pembangunan Desa Tangguh di Desa Banjarasri jadi harus diundur karena dana yang tadinya bisa digunakan perlu direlokasikan kepada bencana covid-19. Hal ini juga dikarenakan penanganan bencana banjir di Desa Banjarasri juga bergesekan waktunya dengan datangnya bencana wabah covid-19 di Indonesia, sehingga pendanaan untuk bencana dilakukan *refocusing* kearah bencana covid-19.

“Untuk non-strukturalnya, kita mau merencanakan membuat sekolah tangguh dan desa tangguh di sana. Tetapi karena ada *re-focusing*, semacam penyesuaian APBD jadinya banyak yang diarahkan ke covid jadi untuk realisasinya masih on-hold.” (KABID Pencegahan, Kedaruratan, & Logistik BPBD; 12/01/2022).

Selain itu, faktor internal lainnya terjadi pada masyarakat yang kerap melakukan pembangunan tanpa ijin sehingga tidak pernah melalui analisis dampak lingkungan pada pembangunannya dikarenakan pembangunan bangunan-bangunan di sana dilakukan secara illegal. Sehingga banyak rumah-rumah yang harus diuruk karena dibangun di pinggiran sungai yang tentunya akan mempengaruhi area resapan air hujan yang kemudian bisa berakibat banjir.

“kita juga menyarankan masyarakat untuk tidak membangun rumah di pinggir sungai, karena itu juga menjadi pemicu penurunan tanah dan banjir. Setelah sudah dilarang, akhirnya sudah bersih itu tidak ada rumah lagi. disitu soalnya rumah-rumahnya illegal dan asal bangun” (KABID Pencegahan, Kedaruratan, & Logistik BPBD; 12/01/2022).

Meskipun BPBD menyatakan bahwa rumah-rumah tersebut sudah diatasi, namun dari sisi masyarakat desa masih merasa masih ada oknum-oknum dari warga yang tidak mau membongkar lahannya padahal lahan mereka menutup saluran-saluran air. Dilansir dari perwakilan Kepala Desa, selain tanpa izin, ada warga yang menutup saluran air dengan membangun pertokoan. Meski sudah ditegur oleh pihak perangkat Desa, namun masih belum ada perubahan.

“Di sini nggak pake izin. Pokoknya bikin rumah aja. Jadi karena nggak ada izin ya sakarepe dewe. Jadi kayak saluran-saluran air itu ditutup karena toko, halaman, dan lain-lain sama warga. Padahal sudah saya berikan pengertian berkali-kali tetep saja nggak ada perubahan sampai sekarang.” (Seksi Perencanaan Desa Banjarasri; 13/01/2022).

Faktor penghambat eksternalnya, meskipun BPBD tidak bisa mengkonfirmasi kebenaran dari dampak pengeboran sumur yang dapat memicu tandusnya dan turunnya tanah, namun warga merasa sangat yakin kalau pengeboran itu tetap berlanjut maka pengurangan resiko banjir tidak akan berjalan optimal karena pengeboran merupakan salah satu indikator yang menyebabkan perubahan struktur tanah di Desa Banjarasri. Namun pihak perusahaan swasta tersebut masih melakukan pengeboran hingga saat ini dan berdalih sudah memiliki izin meskipun dilarang oleh warga.

“Sebenarnya pengeboran dari perusahaan W itu membuat kami takut, tapi kayaknya banyak warga yang ditekan untuk setuju jadi akhirnya mereka selalu bilang ada ijinnya. Jadi akhirnya kan pengeboran terus kami itu takut kalau sampai lumpur lapindo, soalnya udah bukan satu sumur lagi yang dibor, tapi banyak sumur. Kami dari warga juga sudah menolak namun mereka kan selalu mellihatkan surat-surat ijinnya yang memang sudah ditandatangani pemerintah, jadi ya kami nggak bisa apa-apa mbak. “ (Seksi Perencanaan Desa Banjarasri; 13/01/2022)

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat internal dari implementasi kebijakan Pengurangan Resiko Banjir di Desa Banjarasri ini meliputi adanya hambatan relokasi dana yang mulanya akan digunakan untuk pembentukan Desa Banjarasri karena tergecat dengan situasi darurat covid-19, selain itu juga adanya perilaku tidak bertanggung jawab dari beberapa oknum masyarakat yang melakukan pembangunan rumah secara illegal. Hal ini juga disebutkan pada penelitian (Agustion, 2020) bahwa adanya ketidakpatuhan dan kurangnya kooperatif yang ditunjukkan oleh masyarakat dapat berdampak pada terhambatnya atau lambatnya penanganan bencana pada daerah rawan bencana.

Kemudian pada faktor penghambat eksternal, meski dari BPBD tidak merasa ada penghambat, namun warga merasa pengeboran yang dilakukan perusahaan swasta di Desa Banjarasri merupakan penghambat optimalnya implementasi penanganan bencana dan resiko bencana yang ada, sehingga selama pengeboran itu berlanjut, masih ada ketakutan dari warga bahwa bencana yang terjadi akan menjadi lebih besar. hal ini perlu diperhatikan pula, dikarenakan jika masih terdapat miskomunikasi dan kesalahpahaman antara pihak pemerintah dan masyarakat dapat berdampak pada kurang terkendalinya hubungan koordinasi yang ada, yang mana bisa berdampak pula pada terhambatnya atau lambatnya penanganan yang diberikan pada situasi bencana (Agustino, 2020).

4.3 Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan merupakan proses mengevaluasi atau menilai beberapa opsi atau alternative kebijakan untuk menentukan mana tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah social, ekonomi, politik, dan fisik yang sedang atau akan dihadapi oleh masyarakat. Pada situasi bencana banjir Desa Banjarasri yang masih belum benar-benar pulih seluruhnya sejak 2019 lalu hingga saat ini tahun 2022, kebijakan-kebijakan terkait dengan pengurangan resiko bencana yang sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 37 ayat 2 yaitu:

- 1) Melibatkan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan penanganan bencana
- 2) Melakukan pengenalan dan pemantauan risiko bencana dengan mendatangkan ahli bencana dari ITS untuk melakukan kajian teknis.
- 3) Mengembangkan budaya sadar bencana dengan memberikan edukasi pada

masyarakat mengenai kebencanaan dan membangun posko-posko lapangan dengan relawan terlatih.

- 4) Meningkatkan komitmen dengan memperbaiki kinerja secara internal dan meningkatkan *output* baik dengan dibuktikan oleh penilaian IKD yang baik.
- 5) Melakukan mitigasi bencana fisik maupun non fisik sebagai penanganan bencana.

Dari poin-poin di atas, dapat diketahui bahwa kebijakan-kebijakan mengenai pengurangan resiko bencana yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh BPBD sudah sesuai dengan bunyi dalam UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 37 ayat 2. Akan tetapi, pada kenyataannya, dari sisi masyarakat masih ada sedikit kekecewaan atas kebijakan yang ada meskipun di lain sisi masyarakat sudah merasa sangat terbantu. Adapun permasalahan masyarakat yang belum terselesaikan dalam hal penanganan bencana banjir di Desa Banjarasri ini adalah permasalahan perekonomian jangka panjang, dimana karena genangan tersebut masih ada dan merusak lahan pertanian warga, membuat banyak warga yang terdampak karena kehilangan mata pencahariannya, mengingat Desa Banjarasri merupakan desa dengan mayoritas masyarakatnya bertani.

Rekomendasi kebijakan yang ditawarkan oleh peneliti adalah melakukan penanganana prioritas pemulihan ekonomi yang difokuskan pada *output* jangka panjang, selain memberikan bantuan ekonomi berupa perbaikan rumah atau sembako, hendaknya pemerintah juga membuat kebijakan atau program pemulihan ekonomi paska bencana banjir dengan produk-produk kebijakan yang dapat membantu masyarakat secara jangka panjang. Adapun rekomendasi yang

ditawarkan peneliti antara lain sebagai berikut:

- 1) Memprioritaskan pemulihan ekonomi jangka panjang dan rekonstruksi paska bencana.
- 2) Memprioritaskan rekonstruksi pemulihan sector pertanian dengan melakukan pembaharuan dan perbaikan pada galangan sawah yang jebol dan rata dengan tanah, genangan yang tak kunjung habis di area pertanian, dan memberikan bantuan-bantuan alat-alat bertani seperti traktor, benih, dan sebagainya.
- 3) Memprioritaskan pemulihan ekonomi jangka panjang dengan memberikan bantuan dana hibah UMKM untuk mendukung masyarakat Desa Banjarasri berwirausaha.
- 4) Memberikan pelatihan perihal manajemen ekonomi yang perlu dilakukan masyarakat paska bencana dan bagaimana cara menyiapkan dana-dana darurat untuk mempersiapkan risiko kerugian besar yang dihadapi ketika bencana terjadi.

Rekomendasi kebijakan di atas, dicetuskan oleh peneliti melalui berbagai pertimbangan. Selain belum adanya tindakan maupun kebijakan pemulihan ekonomisecara jangka panjang yang dilakukan oleh Pemerintah pada pengurangan Resiko Bencana dimana harusnya hal tersebut dimasukkan karena pemulihan ekonomi jugatermasuk bentuk penanganan bencana secara non-fisik. Selain faktor tersebut, peneliti juga mendapatkan hasil observasi bahwa memang banyak penduduk yang memiliki lahan pertanian tanaman pangan sendiri yangmana kemudian panen-nya terganggu karena adanya genangan yang merusak lahan pertaniannya, sehingga dapat berdampak pada laju perekonomian penduduk. Hal

ini juga ditunjukkan dari data penduduk yang didapat dari Kantor Kepala Desa, dimana jumlah keluarga petani di Desa Banjarasri adalah 182 Keluarga, dengan detail sebagai berikut.

Table 4.4 Data Keluarga Petani

Kepemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan	
Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian	110 Keluarga
Jumlah keluarga tidak memiliki tanah pertanian	72 Keluarga
Memiliki lahan pertanian < 10 ha	92 Keluarga
Memiliki lahan pertanian 10 – 50 ha	10 keluarga
Memiliki lahan pertanian 50-100 ha	5 Keluarga
Memiliki lahan pertanian > 100 ha	3 Keluarga
Jumlah total keluarga petani	182 Keluarga

Sumber: Data Pontensi dan Perencanaan Desa Banjarasri 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa dengan adanya bencana banjir ini maka banyak keluarga petani yang terdampak secara ekonomi. Hal tersebut juga turut diungkapkan oleh pihak Desa bahwa sebetulnya yang paling berdampak ada pada mata pencaharian masyarakat yang merupakan mayoritas petani menjadi terhambat pemasukannya ketika banjir menggenangi lahannya. Namun dari hasil penelitian yang ada, masih belum ada kebijakan dalam penanganan pemulihan ekonomi jangka panjang untuk mempersiapkan keluarga yang bersandar pada mata pencaharian petani agar dapat melakukan usaha lain yang dapat mendukung pemasukan ekonominya dan siap ketika ada bencana banjir karena sudah tak lagi bersandar pada pertanian.

Kebijakan pemulihan ekonomi jangka panjang paska banjir melalui pemberian alat-alat untuk berwirausaha juga pernah diberlakukan di Dusun Koryo Desa Bulutigo sebagai moel penguatan sumber perekonomian baru selain pertanian, adapun salah satu pelatihan yang diberikan adalah pelatihan pembuatan

kerajinan taslimbah plastik yang menciptakan petani-petani yang juga ahli dalam berwirausaha kreatif (Ubaidillah, 2018). Dari hasil penelitian yang dilakukan Ubaidillah (2018) tersebut pemberian program pelatihan berwirausaha sebagai salah satu kegiatan untuk pemulihan ekonomi masyarakat juga dapat merangsang pola pikir masyarakat yang mulanya mayoritas petani menjadi terbuka pikirannya bahwa penafkahan dapat mereka dapatkan tidak hanya dengan bertani, namun juga dengan melakukan hal lain.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari paparan hasil penelitian yang sudah dipaparkan oleh peneliti pada BAB sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadinya bencana banjir di Desa Banjarasri dikarenakan struktur tanah Desa Banjarasri yang lempung sehingga sulit untuk menyerap air, selain itu bentuk kawasan area Desa yang memang seperti mangkok sehingga sangat rentan untuk menampung genangan air yang datang dari sisi daerah-daerah lain yang kemudian sulit untuk surut karena harus dilakukan pemompaan. Dalam menangani hal tersebut, kebijakan penanganan bencana yang dilakukan oleh BPBD bersama bantuan dari masyarakat sudah sesuai dengan poin-poin kegiatan pengurangan resiko bencana yang disebut dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Pasal 37 Ayat 2. Hal ini ditunjukkan dari adanya kajian teknis, pembentukan masyarakat yang tanggap bencana, pemberlakuan mitigasi struktural maupun non struktural, dan melibatkan partisipasi alat-alat pemerintahan, juga masyarakat dalam penanganan bencana yang dilakukan.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat dari implementasi kebijakan pengurangan resiko bencana tersebut adalah :

Faktor pendukung: (a) kinerja yang baik dari internal BPBD dengan pembuktian nilai IKD yang baik; (b) sinergitas penanganan bencana antara masyarakat dan pemerintah; (c) adanya komunitas masyarakat seperti FPRB

(Forum Pengurangan Resiko Bencana) Kabupaten Sidoarjo.

Faktor penghambat: (a) *refocusing* dana yang difokuskan pada penanganan wabah covid-19; (b) adanya oknum-oknum warga yang masih melakukan pembangunan ilegal dan belum mau menguruk lahannya; (c) adanya pengeboran dari salah satu perusahaan swasta.

5.2 Saran

Untuk menambah optimalisasi penanganan bencana dan pengurangan resiko bencana banjir di Desa Banjarasri, yang sebetulnya sudah baik, peneliti memberikan rekomendasi-rekomendasi tambahan kebijakan yang mungkin dapat dipertimbangkan oleh pemerintah sebagai berikut:

- 1) Memprioritaskan pemulihan ekonomi jangka panjang dan rekonstruksi paska bencana.
- 2) Memprioritaskan rekonstruksi pemulihan sector pertanian dengan melakukan pembaharuan dan perbaikan pada galangan sawah yang jebol dan rata dengan tanah, genangan yang tak kunjung habis di area pertanian, dan memberikan bantuan-bantuan alat-alat bertani seperti traktor, benih, dan sebagainya.
- 3) Memprioritaskan pemulihan ekonomi jangka panjang dengan memberikan bantuan dana hibah UMKM untuk mendukung masyarakat Desa Banjarasri berwirausaha.
- 4) Memberikan pelatihan perihal manajemen ekonomi yang perlu dilakukan masyarakat paska bencana dan bagaimana cara menyiapkan dana-dana darurat untuk mempersiapkan risiko kerugian besar yang dihadapi ketika bencana.

Tabel 4.5 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Situasi Masalah	Meta Masalah	Masalah Substantif	Masal Formal
Bencana banjir mengganggu mobilitas kehidupan masyarakat Desa Banjarasri	Masyarakat kehilangan mata pencaharian (petani) Banjir merusak lahan pertanian masyarakat Masyarakat mengalami kerugian finansial. Renovasi rumah karena adanya pengurangan menambah beban finansial masyarakat. Banjir menyebabkan masyarakat kekurangan air bersih. Perekonomian masyarakat terhambat dikarenakan beban finansial yang cukup besar dan rusaknya lahan pertanian. Kurangya pengetahuan masyarakat mengenai strategi penafkahan Kesulitan mencari modal nafkah alternative.	Masyarakat kehilangan mata pencaharian karena lahannya rusak Adanya beban-beban finansial yang harus dipenuhi paska bencana Adanya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan finansial karena kurangnya pengetahuan dan kesulitan mencari nafkah.	Mobilitas ekonomi masyarakat terganggu paska bencana banjir karena masih belum siap dalam menghadapi dampak finansial.
kondisi alam menyebabkan bencana banjir di Desa Banjarasri	Desa Banjarasri terletak diapit oleh desa-desa lain yang juga termasuk kawasan rawan banjir Desa Banjarasri memiliki tekstur tanah yang lempung dan berbentuk seperti mangkok.	Tekstur tanah dan bentuk daerah Desa banjarasri memicu terjadinya banjir.	Tanah lempung dan bentuk desa menyebabkan bencana banjir di Desa Banjarasri
Manusia menyebabkan bencana banjir di Desa Banjarasri	Tertutupnya selokan karena pembangunan yang dilakukan oknum masyarakat dan tertutupnya tanah serapan di tepi sungai karena pembangunan yang dilakukan oknum masyarakat. Adanya pengeboran minyak yang dilakukan suatu perusahaan swasta.	Adanya indikasi pembangunan illegal oleh oknum masyarakat yang tidak sesuai AMDAL.	Pembangunan illegal yang tidak melalui analisis dampak lingkungan dapat menyebabkan bencana banjir di Desa Banjarasri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia . *Jurnal Borneo Administrator* 16(2).
- Akib, T. H. (2021). ANALISIS KEBIJAKAN RESETTLEMENT DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI LAMPUNG SELATAN. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9 (1).
- Ariantoni. (2009). *Modul Pelatihan: Pengintegrasian Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Ke dalam Sistem Pendidikan*. Jakarta: Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional.
- Asdak. (2004). *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Bungin, B. (2012). *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali.
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harianja, H. (2020). Analisis Kebijakan Publik dalam Penerapan E- Government Binjai Smartcity. *SCENARIO 2020 (Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora)*.
- Indradhi Faisal Ibrahim, E. W. (2019). Identifikasi Penyebab Banjir di Kecamatan Cimahi Selatan. *Seminar Nasional Cendekiawan ke 5 Tahun 2019, Buku 1: "Teknologi dan Sains"*.
- Iskandar. (2000). *Manajemen Publik*. Bandung: Pustaka Program Pascasarjana.
- Muhammad, F. I. (2019). MPLEMENTASI KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA BANJIR DI KABUPATEN BANDUNG STUDI KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA BANJIR DI DESA DAYEUHKOLOT KABUPATEN BANDUNG. *Thesis Universitas Pasundan*.
- Muzakir Zainal, M. M. (2020). Pengurangan Resiko bencana Berbasis Komunitas Melalui Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Pidie Jaya Naggroe Aceh Darussalam. *ENGAGEMENT* 4(1).
- Noor. (2014). *Pengantar Mitigasi Bencana Geologi*. Yogyakarta: Dee Publish.
- Nugroho, R. (2009). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurjanah. (2012). *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.
- Pribadi, K. S. (2007). *Konsep Pengelolaan Bencana: Makalah TOT Pengelolaan Resiko Bencana Berbasis Pesantren Nahdlatul Ulama*. Bandung: Pusat Mitigasi Bencana ITB.
- Rakasisi, E. S. (2018). Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Bandar Lampung. *Skripsi Universitas Lampung*.
- RI, L. A. (2008). *Analisis Kebijakan Publik MODUL PENDIDIKAN DAN PEATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III*. Jakarta: LAN.
- Riady Ibnu Khaldun, Y. P. (2019). Analisis Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus PERDA Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011). *Journal of Public*

Administration and Government 1(2), 2.

- Saldana, M. H. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, edition 3*. USA: Sage Publications.
- Sari. (2014). Peran Simulasi Bencana terhadap Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi di MTs Negeri Gantiwarno Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten. *Universites Muhammadiyah Surakarta*.
- Sarundajang. (2001). *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sebastian, L. (2008). Pendekatan Pencegahan dan Penanggulangan Banjir. *Jurnal Dinamika Teknik Sipil* 8.
- Sidoarjo, B. K. (2020). *Laporan Data Informasi, dan Kejadian Bencana Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 (Bulan November)*. Sidoarjo: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taufiq, M. (2020, Februari 17). *Pertimbangan Pemkab Sidoarjo Tetapkan Tanggap Darurat Bencana untuk Banjir Banjarsari Tanggulangi*. Retrieved from Berita Sidoarjo: <https://surabaya.tribunnews.com/2020/02/17/pertimbangan-pemkab-sidoarjo-tetapkan-tanggap-darurat-bencana-untuk-banjir-banjarsari-tanggulangi>
- Teguh, B. H. (2002). *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. Semarang: UNDIP Press.
- Thoha. (1999). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali.
- UNISDR. (2015). Disaster Resilience Scorecard for Cities. In UNISDR, *Ten Essentials for Making Cities Resilient in Support of the Sendai Framework for Disaster Reduction 2015-2030*. Inter-Agency Secretariat of the International Strategy for Disaster Reduction.
- Wandasari. (2013). Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Mewujudkan Pengurangan Risiko Bencana. *UNNES Law Journal* 2(2).
- Widayati, R. S. (2020). Studi Kajian Peran BPBD dan Aisyiyah *Disaster Action* dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana di Surakarta. *GASTER* 18(1).
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: MediaPressindo.

LAMPIRAN



Gambar 4.11 Gambaran Mitigasi Bencana Fisik

Sumber : Dokumentasi Peneliti

DOKUMENTASI SAAT PENGAMBILAN DATA

Gambar 4.12 Foto Wawancara dan Observasi

Sumber : Dokumentasi peneliti